



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

Jln. Balai Kota No. 1 ☎. (0967) 536898, 523711 Entrop - Jayapura

Nomor : Jayapura, 29 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Penyampaian Data Kepada Yth
Dinas Komunikasi dan Informatika
di
Jayapura

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Kota Jayapura Nomor : 555/1085/SETDA tanggal 19 Juli 2024 perihal Pengumpulan Data PPID Kota Jayapura Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan data Daftar Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Data disajikan Dalam Bentuk Softcopy dan Hardcopy (Data Terlampir)

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

**KEPALA DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN**

**NOFDI J. RAMPI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650814 198703 1 018**

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Jayapura (sebagai laporan);
2. Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Arsip.

2.1.1 Visi

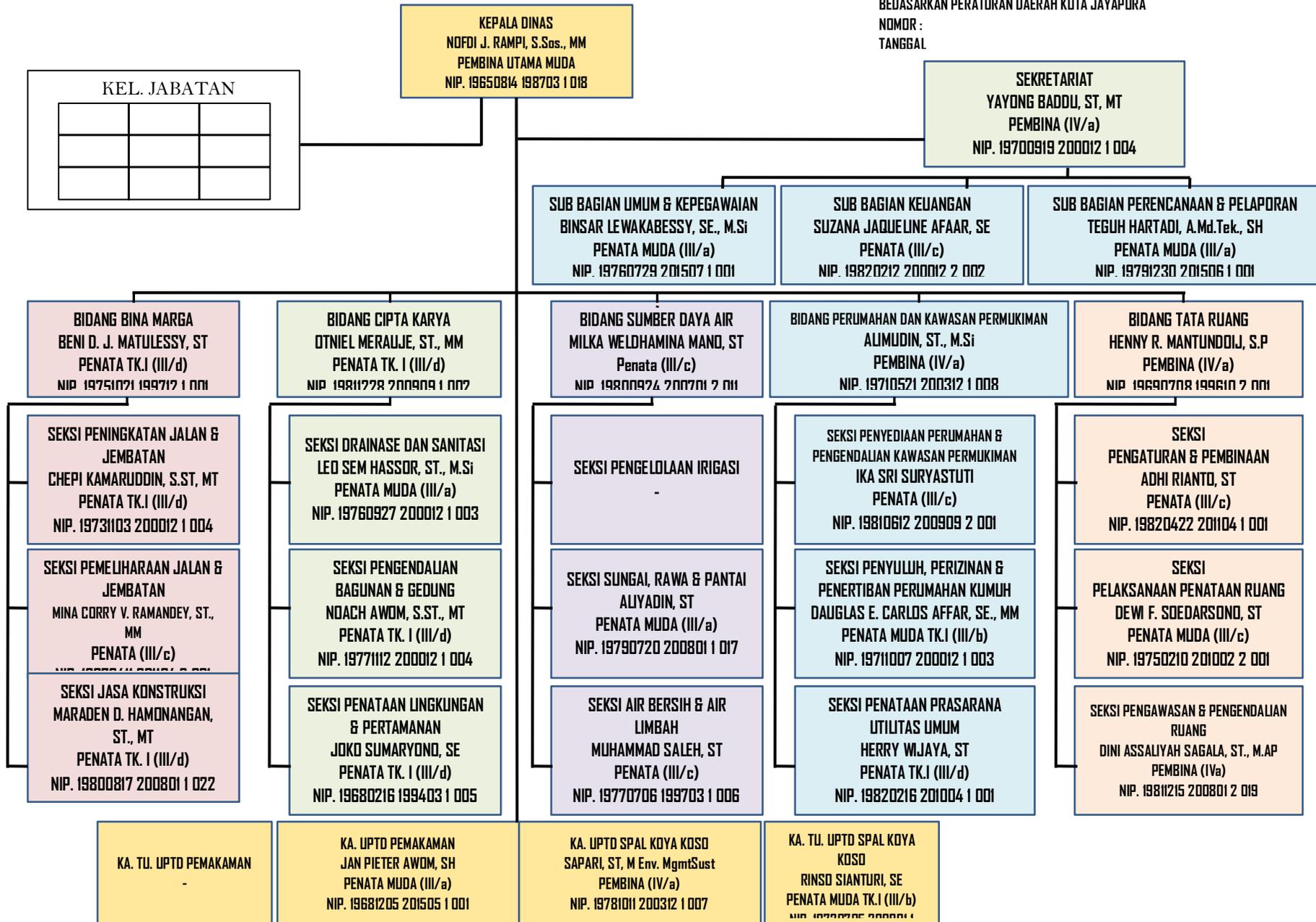
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Jayapura dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Jayapura sebagai Kota Jasa yang Beriman, Maju, Mandiri Dan Sejahtera. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura Tahun 2023 – 2026 mengacu pada Visi dan Misi Penjabat Walikota terpilih yaitu : “Masyarakat Kota Jayapura Yang Beriman, Maju, Mandiri Dan Sejahtera” sesuai dengan Visi RPJPD Kota Jayapura yang menjadi acuan sebelum kepala Daerah Definitif Terpilih

2.1.2 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Penjabat Walikota Terpilih ada 6 (enam) Misi yang mengacu pada RPJPD Kota Jayapura dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura masuk dalam misi ke 2 sampai 4 dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Kota Jayapura yang Bersih, Indah, Lestari, Manusiawi, Aman dan Nyaman
- 2) Mewujudkan Kota Jayapura Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa
- 3) Membangun Tata Pemerintahan Yang Baik (good governance)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAYAPURA
BEDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR :
TANGGAL



H.3 Seksi Penataan Prasarana Utilitas Umum

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan penataan prasarana, sarana dan utilitas umum dan pengembangan penataan kawasan permukiman

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pengembangan penataan prasarana, sarana dan utilitas umum dan penatan kawasan permukiman dan pemakaman di wilayah Kota Jayapura;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan penataan prasarana, sarana dan utilitas umum pada Kota Jayapura dan Penataan Kawasan Permukiman dan Pemakaman di Wilayah Kota Jayapura;
- c. Penyusunan pedoman dan manual, perencanaan, pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. Pelaksanaan pembangunan rusunawa dan rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, fasilitas umum dan fasilitas social;
- e. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerahtentang pencegahan timbulnya penataan kawasan permukiman dan pemakaman kumh di wilayah Kota Jayapura;
- f. Penyelenggaraan penanganan penataan kawasan permukiman dan pemakaman perkotaan di kota jayapura;

- g. Pelaksanaan pengelolaan peremajaan/perbaikiakan penataan kawasan permukiman dan pemakaman;
- h. Perencanaan, penyiapan lahan, menata pemakaman, dan pengadaan serta pengolahan perlengkapan dan peralatan pemakaman;
- i. Pelaksanaan registrasi kegiatan pendaftaran, pencatatan berkala dan membuat pedoman pemanfaatan tempat pemakaman umum;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kawasan dan pemakaman kumuh di Kota Jayapura;
- k. Pelaksanaan evaluasi program penataan kawasan permukiman dan pemakaman di Kota Jayapura;
- l. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah, kebijakan dan strategi pembangunan kawasan permukiman dan pemakaman di wilayah Kota Jayapura;
- m. Penyiapan Bahan Penyelenggaraan pembangunan penataan kawasan permukiman dan pemakaman nasional;
- n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan pemakaman di wilayah Kota Jayapura;
- o. Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulant di RSH, RUSUN dan RUSUS;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- r. Pelaksanaan koordinas pengelolaan pengembangan fasilitas umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura Kota Jayapuramempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas

Sekretaris

- ↳ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- ↳ Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- ↳ Sub Bagian Keuangan

Bidang Bina Marga, terdiri atas

- ↳ Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
- ↳ Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- ↳ Seksi Jasa Konstruksi

Bidang Cipta Karya, terdiri atas :

- ↳ Seksi Drainase dan Sanitasi
- ↳ Seksi Pengendalian Bangunan dan Gedung
- ↳ Seksi Penataan Lingkungan dan Pertamanan

Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :

- ↳ Seksi Irigasi
- ↳ Seksi Sungai Rawa dan Pantai
- ↳ Seksi Air Bersih dan Air Limbah

Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, terdiri atas :

- ↳ Seksi Prasarana, sarana dan Utilitas Umum
- ↳ Seksi Penyediaan Perumahan & Pengawasan Kawasan Perumahan Kumuh

- ‡ Seksi Penyuluhan, Perizinan & Penertiban Perumahan Kumuh

Bidang Penataan Ruang, terdiri atas :

- ‡ Seksi Pengaturan dan Pembinaan
- ‡ Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
- ‡ Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Kelompok Jabatan Fungsional

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Ringkasan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Retensi Arsip	Jenis Media yang Memuat/Mempublikasikan
1	2		3	4
Informasi Tentang Profil Dinas/Badan Publik				
1	Domisili Beserta Alamat Lengkap	Jln. Balai Kota No. 1 (. (0967) 536898, 523711 Entrop - Jayapura	Hardcopy dan Softcopy	Selama Masa Berlaku
2	Visi dan Misi		Softcopy	Selama Masa Berlaku
3	Tugas dan Fungsi		Softcopy	Selama Masa Berlaku
4	Struktur Organisasi Dinas/Badan		Softcopy	Selama Masa Berlaku
5	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		Softcopy	Selama Masa Berlaku

Jayapura, 30 JULI 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN K
KOTA JAYAPURA**

NOFDI J. RAMPI, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19650814 198703 1 018

5
www.info.go.id
www.info.go.id
www.info.go.id
www.info.go.id
www.info.go.id

KAWASAN PEMUKIMAN

**REKAPITULASI RKA DINAS PUPRPKP KOTA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	SUMBER DANA	OUTPUT	SATUAN	PAGU ANGGARAN	DOKUMENTASI
BIDANG CIPTA KARYA						
PROGRAM : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG KEGIATAN : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Ijin Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung SUB KEGIATAN : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota PAKET PEKERJAAN :						
1	Pembangunan Gedung Sinode Jayapura	OTSUS	1200	M2	1,950,000,000	
2	Pembangunan Pagar Gereja Henwani BTN Skyline Kotaraja	OTSUS	185	M2	433,799,840	
3	Pembangunan Pengembangan Lanjutan Kantor Walikota	DAU	1	Unit	1,421,856,200	
4	Pembangunan Pengembangan Lanjutan Kantor DPRD Kota	DAU	1	Unit	1,950,000,000	
5	Pembangunan Kantor Kelurahan Waymhorok	DAU	1	Unit	433,799,840	
6	Pembangunan Menara Lonceng di Gereja di BTN Skyland	DAU	1	Unit	462,590,000	
7	Pembangunan Pagar Rumah Dinas Kajati	PAD	33	M	118,800,000	
8	Pembangunan Pagar dan Sel Kantor Kejari	PAD	50	M	377,800,000	
9	Pembangunan Halaman Parkir Kantor Walikota	PAD	400	M2	421,670,400	
10	Pembangunan Gedung Pembinaan GKI Klasis Port Numbay Nasimborhoy Skyline (DAU)	DAU	1	Unit	462,590,000	
PROGRAM : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG KEGIATAN : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung SUB KEGIATAN : Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						
1	Pengaspalan Halaman Gereja Katolik Kristus Terang Dunia Waena (DAU)	DAU	1152	M2	399,298,176	
2	Rehabilitasi Rumah Tahanan Lapas Abepura	PAD	100	M2	264,000,000	
3	Rehabilitasi Gedung Pertemuan Warga di RT.03/RW.8 Belakang RS Marten Indey Kel. Gurabesi	DBH	1	Unit	396,000,000	

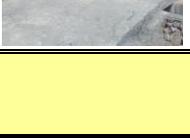
4	Rehabilitasi Gedung Pertemuan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Distrik Muaratami	DBH	1	Unit	176,000,000	
5	Rehabilitasi Pagar Gereja Kristus Terang Dunia Waena	DBH	126	M2	352,800,000	

PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE KEGIATAN : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan PAKET PEKERJAAN :						
1	Pembangunan Drainase Distrik JAPUT, Kel.Gurabesi, RT.005/RW.004	DAU	300	M'	450,528,000	
2	Pembangunan Drainase Distrik JAPUT, Kel.Angkasapura, RT.003/RW.002	DAU	100	M'	322,000,000	
3	Pembangunan Drainase Kelurahan Angkasa	DAU	88	Meter	220,000,000	
4	Pembangunan Drainase Perumahan Pemda Buper Block A RT.03/RW.01 Kampung Waena	DAU	88	Meter	220,000,000	
5	Pembangunan Drainase Distrik JAPUT, Kel.Gurabesi RT.2/RW.9	DAU	200	M'	192,800,000	
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE KEGIATAN : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan PAKET PEKERJAAN :						
1	Rehabilitasi saluran Depan Mesjid Tembus Toko Saga Mall, RT.03/RW.06 Kel. Tanjung Ria	PAD	60	M	149,595,000	
PROGRAM : Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI) KEGIATAN : Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kota Jayapura PAKET PEKERJAAN :						
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DAU	6	Taman	300,000,000	
PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KEGIATAN : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Persefujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota PAKET PEKERJAAN :						
1	Konsultasi Perencanaan Perda RDTR Kota Jayapura	DAU	1	Dokumen	400,000,000	
BIDANG TATA RUANG						
PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KEGIATAN : Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang PAKET PEKERJAAN :						
1	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	DAU	48	Rekomendasi	250,000,000	
PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang PAKET PEKERJAAN :						
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	DAU	200	Bangunan	400,000,000	
BIDANG BINA MARGA						
PROGRAM : Penyelenggaraan Jalan KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Kota SUB KEGIATAN : Pembangunan Jalan PAKET PEKERJAAN :						

1	Pembangunan Jalan Penghubung Koya Barat	OTSUS	1270	M'	3,810,000,000	
PROGRAM : Penyelenggaraan Jalan KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Kota SUB KEGIATAN : Rehabilitasi Jalan PAKET PEKERJAAN :						
1	Rehabilitasi Jalan Lingkungan, Distrik Abepura, Kel.Asano, RT.03/RW.04, RT.04/RW.03 (DBH)	DBH	100	M'	423,500,000	
2	Rehabilitasi Jalan Gang, Distrik Heram, Kel.Yabansai, RT.01/RW.04 (DBH)	DBH	350	M'	423,500,000	
3	Pengaspalan Jalan lingkunganWai Mhorock Distrik Abepura RT.010/RW.003 (DBH)	DBH	300	M'	423,300,000	
4	Rehabilitasi Jalan Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan Entrop, RT.09/RW.09 (DBH)	DBH	200	M'	423,500,000	
5	Rehabilitasi Jalan RW. 5 / RT. 05, 06 Kelurahan Wahno	DAU	195	M'	326,009,970	

6	Rehabilitasi Jalan Furia Alam Indah Kotaraja (DBH)	DBH	270	M'	371,790,000	
7	Rehabilitasi Jalan Kampung Horas Kotaraja (DBH)	DBH	100	M'	390,000,000	
8	Rehabilitasi Jalan Jalan PDAM Entrop (DBH)	DBH	200	M'	928,397,000	
9	Rehabilitasi Jalan Flamboyan Kotaraja (DBH)	DBH	400	M'	923,000,000	
10	Rehabilitasi Jalan Organda (DBH)	DBH	550	M'	2,124,650,000	
11	Rehabilitasi Jalan Hamadi Rawa 3 Distrik JAPSEL, Kel.Hamadi, RT.02/RW.03 (DAU)	DAU	150	M'	511,950,000	
12	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Distrik JAPSEL, Kel.Hamadi, RT.03/RW.VII (DAU)	DAU	120	M'	372,480,000	
13	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kota Baru, RT.01/RW.04 (DAU)	DAU	250	M'	233,000,000	
14	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Samping Ktr Lurah Wai Mhorock (Kmpleks Perumahan Ampera) (DAU)	DAU	100	M'	372,694,000	
15	Rehabilitasi Jalan Distrik Abepura, Kel.Asano, RT05/RW.02 (DAU)	DAU	200	M'	465,500,000	
16	Rehabilitasi Jalan Distrik JAPUT, Kel.Gurabesi (DAU)	DAU	150	M'	139,950,000	
17	Rehabilitasi Jalan Distrik JAPUT, Kel.Tanjung Ria, RT.02/RW.2 (DAU)	DAU	200	M'	233,000,000	
18	Rehabilitasi Jalan samping Pasar Distrik JAPSEL, Kel.Entrop, RT.03/RW.13	DAU	375	M'	413,625,000	
19	Rehabilitasi Jalan Perumahan Perumnas IV RW.12 / RT.02, 03	DAU	70	M'	139,510,000	
20	Rehabilitasi Jalan Lingkungan VIM, Kota Baru Distrik Abepura, Kel.VIM, RT.03/RW.III (DAU)	DAU	200	M'	465,500,000	
21	Rehabilitasi Jalan Distrik Abepura, Kel.Wai Mhorock, RT.05/RW.06 (DAU)	DAU	180	M'	279,360,000	

22	Rehabilitasi Jalan Distrik Hedam, Kel.Waena, RT.001/RW.01 (DAU)	DAU	150	M'	233,007,000	
23	Rehabilitasi Jalan Gang Matoa Perumnas II, Distrik Heram, Kel. Yabansai, RT.001.002/ RW.004 (DAU)	DAU	240	M'	233,016,000	
24	Rehabilitasi Jalan Gang Matoa Perumnas II, Distrik Heram, Kel. Yabansai, RT.001.002/ RW.004 (DAU)	DAU	240	M'	233,016,000	
25	Rehabilitasi Jalan lingkungan Pasir II RT.03/RW.01 Kel.Tanjung Ria	DBH	337	M	660,000,009	
26	Rehabilitasi Jalan Kelurahan Waimhorock	DBH	81	M	834,749,874	
27	Pengecoran Jalan Perumnas IV RW.12/RT.02.03	DBH	132	M	369,600,000	
28	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Gang Buntu RT.02/RW.10 Kelurahan Yabansai	DBH	55	M	154,700,000	
29	Rehabilitasi Jalan dan Gorong-Gorong Jalan Masuk Mushola Darul Rahman RT.01/RW.02 Kampung Yoka	DBH	73	M	204,764,000	
30	Rehabilitasi Pengecoran Jalan Gereja GKI Eden Phukow Kampwolker Perumnas III Kel.Yabansai	DBH	73	M	204,764,000	
31	Rehabilitasi Jalan Beton Kelurahan Abepantai	DBH	130	M	364,000,000	
32	Rehabilitasi Jalan Kelurahan Wahno RT.04/RW.V	DBH	293	M	819,000,000	
33	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Hamadi - Tobafi RT.05/RW.10 Kel. Hamadi	DBH	130	M	364,000,000	
34	Pengecoran Jalan Kompleks Bhayangkara Permai Buper Waena RT.03.05	DBH	81	M	227,500,000	
35	Rehabilitasi Pengecoran Jalan Belut RT.4 Kelurahan Waena	DBH	81	M	227,500,000	
36	Rehabilitasi Pengecoran Jalan Woroth Kelurahan VIM	DBH	81	M	227,500,000	
37	Jalan Masjid Ar-Rahman Mandala	DBH	38	M	105,868,000	

38	Pengecoran Jalan Halilintar Koya Timur	DBH	98	M	273,000,000	
PROGRAM : Penyelenggaraan Jalan KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Kota SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Berkala Jalan PAKET PEKERJAAN :						
1	Peningkatan Jalan Kampung Koya Koso	DAK Afirmasi	1403	M ¹	3,929,798,791	
2	Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan Jayapura	DAK Reguler	512	M ¹	1,349,120,000	
3	Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan Pasifik Indah I BLK	DAK Reguler	570	M ¹	1,501,950,000	
4	Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan Kompleks BTN Skyline	DAK Reguler	878	M ¹	2,137,001,076	
5	Peningkatan Jalan Kampung Koya Koso I	DAK Afirmasi	1783	M ¹	4,992,400,000	
6	Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan Penghubung Koya Barat	DAK Penugasan	1506	M ¹	4,217,153,910	
7	Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan Koya Barat	DAK Penugasan	1200	M ¹	3,360,000,000	
PROGRAM : Penyelenggaraan Jalan KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Kota SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Berkala Jembatan PAKET PEKERJAAN :						
1	Pemeliharaan Berkala Jembatan di Kampung Holtekamp	OTSUS	5	M	200,000,000.00	
2	Pemeliharaan Berkala Jembatan di Kampung Koya kosso	OTSUS	8	M	247,800,000.00	
3	Pemeliharaan Berkala Jembatan di Kampung Koya kosso	OTSUS	100	M ¹	347,800,000.00	
4	Pemeliharaan Berkala Jembatan di Kampung Nafri	OTSUS	6	M	349,998,000.00	
5	Pemeliharaan Berkala Jembatan di Kampung Mosso	OTSUS	2	M	100,000,000.00	
PROGRAM : Penyelenggaraan Jalan KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Kota SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin Jalan (swakelola) PAKET PEKERJAAN :						
1	Pemeliharaan rutin jalan	DBH	543	M ¹	445,260,000	
BIDANG SUMBER DAYA AIR PROGRAM : Program Pengelolaan Sumber Daya Air KEGIATAN : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Dae SUB KEGIATAN : Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai PAKET PEKERJAAN :						

1	Normalisasi Kali di Kota Jayapura (Swakelola)	DAU	3846	M3	699,631,300	
PROGRAM : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah KEGIATAN : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota PAKET PEKERJAAN :						
1	Pembangunan Sarana Prasarana IPAL Domestik Kel. Abepantai	DAK SANITASI	1	Unit	795,877,200	
2	Pembangunan Sarana Prasarana IPAL Domestik Kel. Argapura	DAK SANITASI	1	Unit	795,877,200	
3	Pembangunan Sarana Prasarana IPAL Domestik Kel. Bhayangkara	DAK SANITASI	1	Unit	795,877,200	
4	Pembangunan Sarana Prasarana IPAL Domestik Kel. Imbi	DAK SANITASI	1	Unit	795,877,200	
5	Pembangunan Sarana Prasarana IPAL Domestik Kel. Tanjung Ria	DAK SANITASI	1	Unit	795,877,200	
PROGRAM : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum KEGIATAN : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kc SUB KEGIATAN : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan PAKET PEKERJAAN :						
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan sambungan rumah di Bhayangkara Lapangan	OTSUS	100	SR	1,043,570,000	
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan sambungan rumah di Kampung Kayu Batu	OTSUS	100	SR	1,043,570,000	
PROGRAM : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah KEGIATAN : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Pembangunan Unit Air Baku PAKET PEKERJAAN :						
1	Pengelolaan Air Baku (Sumur Bor) Pemukiman Warga Jl. Pasifik Indah 1 Base G RT.08/RW.1 Kel. Tanjung Ria	DBH	1	Unit	89,100,000	
PROGRAM : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) KEGIATAN : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Dae SUB KEGIATAN : Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing PAKET PEKERJAAN :						
1	Pembangunan Talud Distrik JAPSEL, Kel.Entrop RT.001/RW.013 (DAU)	DAU	100	M'	276,000,000	
2	Pembangunan Talud Kali (Perumnas IV) Distrik Heram, Kel.Hedam, RT.005/RW.008 (DAU)	DAU	119	M	182,427,000	
3	Pembangunan Talud Distrik JAPUT, Kel.Tanjung Ria, RT.05/RW.05 (DAU)	DAU	100	M	184,000,000	
4	Pembangunan Talud sepanjang Masjid NURUL HIDAYAH Distrik JAPUT, Kel.Gurabesi, RT.05	DAU	150	M	229,950,000	
5	Pembangunan Talud Pantai, Argapura RT.004/RW.003	DAU	74	M	136,160,000	
6	Pembangunan Talud RT.03/RW.02 Kelurahan Yabansai	DAU	150	M	183,000,000	
7	Pembangunan Talud dan Tangga argapura Canon RT.001/RW003 Kelurahan Argapura	DBH	80	M	220,000,000	

8	Pembangunan Talud di Kali Siborgonyi	DBH	293	M	819,000,000	
9	Pembangunan Talud RT.004/RW.006 Kelurahan Yabansai	DAU	74	M	136,160,000	

BIDANG PKP

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
KEGIATAN : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
SUB KEGIATAN : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
PAKET PEKERJAAN :

1	Pemasangan LPJU Baru Kel.Wai Mhorock, RT.04/RW.06	DAU	10	Titik	170,000,000	
2	Pemasangan Lampu Jalan Jl. Youtefa Kelurahan Awiyo	DAU	22	Titik	374,000,000	
3	Pemasangan LPJU Jalan Koya Koso, RT.02/RW.02	DAU	22	Titik	374,000,000	
4	Pemeliharaan LPJU	DAU	1	Keg	500,000,000	
	Pemeliharaan Lampu Salib Skyland (DAU)		1	Buah		
	Pemeliharaan Lampu Jayapura City (DAU)		1	Unit		
	Pemeliharaan Pohon Natal Kantor Pos Abepura		1	Unit		
	Pemeliharaan Pohon Natal Kecil		40	Unit		
5	Pemasangan LPJU baru di Perumnas I, Kel. Yabansai RT.01.02/RW.004, Jalan SMU Taruna Bhakti RT.02/RW.03 Waena	DAU	23	Titik	391,000,000	
6	Pemasangan LPJU Jalan Kelurahan Yobe Jl. Pasar lama Kearah Mesjid	DAU	13	Titik	221,000,000	
7	Pemasangan LPJU Baru Kelurahan Asano	DAU	2	Titik	34,000,000	
8	Pemasangan Lampu Jalan Kelurahan Bayhangkara	DAU	23	Titik	391,000,000	

9	Pemasangan LPJU Baru Jl.Woroth	PAD	10	Titik	170,000,000	
10	Pemasangan LPJU Kel. Wahno	DBH	13	Titik	234,000,000	
11	Pemasangan LPJU Kel. VIM	DBH	11	Titik	198,000,000	

PROGRAM : Program Pengembangan Perumahan
KEGIATAN : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
PAKET PEKERJAAN :

1	Penataan Bangunan Akibat Penataan Kawasan Kumuh di APO 45 Sebelah Kiri	DBH	1	Unit	448,000,000	
2	Penataan Bangunan Akibat Penataan Kawasan Kumuh di APO 45 Sebelah Kiri	DAK	1	Unit	148,963,800	

PROGRAM : PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
KEGIATAN : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
PAKET PEKERJAAN :

1	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Tanjung Ria 1	OTSUS	1	unit	275,000,000	
2	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Tanjung Ria 2	OTSUS	1	unit	275,000,000	
3	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Tanjung Ria 3	OTSUS	1	unit	275,000,000	
4	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Imbi	OTSUS	1	unit	275,000,000	
5	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Gurabesi 1	OTSUS	1	unit	275,000,000	
6	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Gurabesi 2	OTSUS	1	unit	275,000,000	
7	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Gurabesi 3	OTSUS	1	unit	275,000,000	
8	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Entrop 1	OTSUS	1	unit	275,000,000	
9	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Entrop 2	OTSUS	1	unit	275,000,000	

10	Pembangunan rumah layak huni Kampung Yoka	OTSUS	1	unit	275,000,000	
11	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Argapura 1	OTSUS	1	unit	275,000,000	
12	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Argapura 2	OTSUS	1	unit	275,000,000	
13	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Argapura 3	OTSUS	1	unit	275,000,000	
14	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Ardipura	OTSUS	1	unit	275,000,000	
15	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Vim	OTSUS	1	unit	275,000,000	
16	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Wahno	OTSUS	1	unit	275,000,000	
17	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Asano	OTSUS	1	unit	275,000,000	
18	Pembangunan rumah layak huni Kampung Nafri	OTSUS	1	unit	275,000,000	
19	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Kota Baru 1	OTSUS	1	unit	275,000,000	
20	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Kota Baru 1	OTSUS	1	unit	275,000,000	
21	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Hedam	OTSUS	2	unit	550,000,000	
23	Pembangunan rumah layak huni Kelurahan Waena	OTSUS	2	unit	550,000,000	
25	Pembangunan rumah layak huni Waena Kampung	OTSUS	1	unit	275,000,000	
26	Pembangunan rumah layak huni Kampung Skouw Sae	OTSUS	1	unit	275,000,000	
27	Pembangunan rumah layak huni Kampung Mosso	OTSUS	1	unit	275,000,000	

28	Pembangunan rumah layak huni Kampung Holtekamp	OTSUS	1	unit	275,000,000	
29	Pembangunan rumah layak huni Kampung Koya Tengah	OTSUS	1	unit	275,000,000	
30	Pembangunan rumah layak huni Kampung Koya Barat	OTSUS	1	unit	275,000,000	
PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN KEGIATAN : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana PAKET PEKERJAAN :						
1	Penyediaan rumah khusus Kampung Mosso	DAK Perumahan	5	Unit	1,240,000,000	
IPTD SPLAD KOYA KOSO PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH KEGIATAN : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik PAKET PEKERJAAN :						
1	Operasional IPLT Koya Koso	DAU	100	KK	150,000,000	

Jayapura, 30 Desember 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAYAPURA

NOFDI J. RAMPI, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650814 198703 1 018



2023

LAPORAN KINERJA (LKJ)



**DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas AnugrahNya, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun 2023, dapat disusun dan disampaikan.

Laporan Kinerja ini disampaikan sebagai laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023.

Demikian laporan kinerja ini disampaikan, disampaikan terima kasih untuk saran demi perbaikan penulisan Laporan Kinerja ini.

Jayapura, 20 Februari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAYAPURA**



NOFDI J.RAMPL, S.Sos,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650814 198703 1 018

DAFTAR ISI

Halaman	i
Kata Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Maksud dan Tujuan	I.3
1.3. Gambaran Umum	I.3
1.4. Landasan Hukum	I.47
1.5. Isu Strategis.....	I.48
1.6. Sistematika Penulisan	I.50
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II.1
2.1 Perencanaan Startegis	II.1
2.2. Indikator Kinerja Utama	II.11
2.3 Perjanjian Kinerja 2022	II.15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III.1
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	III.2
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	III.5
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis...	III.9
3.4. Akuntabilitas Keuangan	III.64

DAFTAR TABEL

1.1.	Tabel Tingkat Pendidikan Pegawai	I-40
1.2.	Tabel Golongan Pegawai	I-41
1.3.	Tabel Pegawai Per Bidang	I-42
1.4.	Tabel Sarana Dan Prasarana Yang Dikelola.....	I-44
1.5	Tabel Daftar Aset	I-45
2.1.	Tabel Hubungan Hierarkis Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran	II-4
2.2.	Tabel Strategi dan Kebijakan	II-6
2.3	Tabel Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua	II-8
2.4.	Tabel Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga	II-9
2.5	Tabel Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat	II-10
2.6	Tabel Rumusan Indikator Kinerja Utama	II-12
2.7	Tabel Satuan Indikator Kinerja Utama	II-14
2.8	Tabel Perjanjian Kinerja	II-16
2.9	Tabel Indikator Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2023-2026	II-17
3.1	Tabel Capaian Indikator Utama Berdasarkan Volume Kegiatan	III-6
3.2	Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	III-10
3.3	Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran.....	III-11
3.4	Tabel Pencapaian Target Misi	III-11
3.5	Tabel Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	III-13
3.6	Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 1	III-14
3.7	Tabel Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Sasaran 1	III-15
3.8	Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 2	III-17
3.9	Tabel Data Penunjang Sasaran 2	III-18

3.10	Tabel Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja	III-19
3.11	Tabel Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran kinerja 2	III-20
3.12	Tabel Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	III-22
3.13	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja tiap indikator sasaran berdasarkan sasaran ke 3.....	III-23
3.14	Tabel Gambaran Tentang Program, Kegiatan, Pagu, Realisasi Anggaran, Output Serta Dampak Terhadap Capaian Kinerja Sasaran ke 3.....	III-23
3.15	Tabel Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	III-25
3.16	Tabel Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi	III-27
3.17	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tiap Indikator Sasaran Berdasarkan Sasaran ke 4.....	III-28
3.18	Tabel Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja Sasaran 4.....	III-29
3.19	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi.....	III-31
3.20	Tabel Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum	III-35
3.21	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tiap Indikator Sasaran Berdasarkan Sasaran ke 5.....	III-36
3.22	Tabel Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja Sasaran 5.....	III-37
3.23	Tabel Tingkat Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum	III-38
3.24	Tabel Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Pemukiman	III-40
3.25	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tiap Indikator Sasaran Berdasarkan Sasaran ke 6.....	III-41
3.26	Tabel Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja Sasaran 6.....	III-42

3.27	Tabel Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya . Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Permukiman.....	III-43
3.28	Tabel Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	III-45
3.29	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tiap Indikator Sasaran Berdasarkan Sasaran ke 7.....	III-45
3.30	Tabel Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja Sasaran 7.....	III-46
3.31	Tabel Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	III-47
3.32	Tabel Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan	III-50
3.33	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tiap Indikator Sasaran Berdasarkan Sasaran ke 8.....	III-51
3.34	Tabel Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja Sasaran 8.....	III-52
3.35	Tabel Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan.....	III-53
3.36	Tabel Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	III-56
3.37	Tabel Data Penunjang Sasaran	III-57
3.38	Tabel Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja Sasaran 9.....	III-58
3.39	Tabel Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.....	III-60
3.40	Tabel Pagu Realisasi Anggaran	III-67
3.41	Tabel Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi	III-68
4.1	Tabel Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan.....	IV-2
4.2	Tabel Pencapaian Sasaran Dan Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian	

Kinerja.....	IV-4
--------------	------

DAFTAR GRAFIK

1.1. Grafik Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.....	I-39
1.2. Grafik Prosentase Tingkat Pendidikan	I-41
1.3. Grafik Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	I-42
1.4. Grafik Jumlah Pegawai Per Bidang	I-43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2023-2026 dituangkan dalam Laporan Kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas PUPRPKP Kota Jayapura di masa yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).

Laporan Kinerja disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Jayapura 2023-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Tahun 2023 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 kepada Walikota Jayapura.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.3. Gambaran Umum

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan lampiran UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk tingkat kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1. Sub Urusan Sumber Daya Air

- a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kota
- b. Pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kota
2. Air Minum
Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kota
3. Air Limbah
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kota
4. Drainase
Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kota
5. Permukiman
Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kota
6. Bangunan Gedung
Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
7. Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kota
8. Jalan
Penyelenggaraan Jalan Kota
9. Jasa Kontruksi
 - a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil kontruksi

- b. Penyelenggaraan system informasi jasa kontruksi cakupan Daerah Kota
- c. Penerbitaan izin usaha jasa kontruksi nasional (non kecil dan kecil)
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi

10. Penataan Ruang

Penyelenggaran penataan ruang Daerah Kota

B. Urusan Pemerintah bidang Perumahan dan kawasan Pemukiman

1. Perumahan

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kota.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kota.
- c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
- d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

2. Kawasan Pemukiman

- a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kota.

3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Penyelenggaraan PSU perumahan.

4. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura merupakan OPD yang bertanggung jawab kepada Walikota Jayapura sebagai penyelenggara pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam wilayah Kota Jayapura. Hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota No 31 Tahun 2016.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura adalah :

A. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang meliputi Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Air, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana kinerja Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

- c. Perencanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- e. Pembinaan dan pemberian rekomendasi advis;
- f. Pembinaan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah;
- g. Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur wilayah;
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern(SPI);
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

B. Sekretariat

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang kesekretariatan meliputi urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan.

Fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kinerja Dinas;
- b. menyelenggarakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan urusan umum lainnya;
- c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan dan asset;

- e. menyusun program dan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas ;
- g. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern(SPI);
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

B.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang pelayanan umum dan administrasi kepegawaian.

Fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan kantor;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga kantor;
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan kantor;
- e. melaksanakan administrasi umum lainnya;
- f. mengolah administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan administrasi kesejahteraan pegawai;
- h. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern(SPI);
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

B.2 Sub Bagian Keuangan

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan keuangan Dinas.

Fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerjanya;
- b. melaksanakan administrasi keuangan belanja langsung, belanja tidak langsung dan administrasi aset;
- c. melaksanakan tertib pembukuan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. mengawasi dan mengendalikan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- e. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. melaksanakan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan Dinas
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B.3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan di bidang perencanaan program dan pelaporan.

Fungsi :

- a. menyusun rencana program dan rencana kinerja Dinas;
- b. mengendalikan dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

- d. menyusun Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci;
- e. menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- g. menyusun pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- h. menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- j. melaksanakan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

C. Bidang Bina Marga

Dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas :

Melaksanakan tugas Kepala Dinas di bidang Bina Marga meliputi perencanaan teknis, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta jasa konstruksi.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kinerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan;
- c. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;

- e. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan evaluasi pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan jasa konstruksi ;
- g. pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI);
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

C1. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup perencanaan, pengendalian, pengawasan teknis atas kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan dan menyusun rencana kerjanya;
- b. penyiapan Bahan dan menyusun kebijakan perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- c. perencanaan teknis, pelaksanaan fisik dan pengawasan teknis pembangunan dan peningkatan jalan;
- d. perencanaan teknis, pelaksanaan fisik dan pengawasan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan;
- e. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

C.2 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup perencanaan, pengendalian, pengawasan teknis atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerjanya;
- b. penyiapan Bahan dan penyusunan kebijakan perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. perencanaan teknis, pelaksanaan fisik dan pengawasan teknis pemeliharaan jalan;
- d. perencanaan teknis, pelaksanaan fisik dan pengawasan teknis pemeliharaan jembatan;
- e. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. penusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

C.3 Seksi Jasa Konstruksi

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerjanya;
- b. penyiapan bahan dan menyusun kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan dan pengasawan jasa konstruksi;

- c. penyiapan bahan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jasa konstruksi bidang kebinamargaan;
- d. penyiapan bahan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jasa konstruksi bidang keciptakaryaan;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi perencanaan teknis dan pengawasan jasa konstruksi perumahan dan permukiman;
- f. pengaturan teknis dan menilai mutu pekerjaan kontraktor dan jasa konsultansi;
- g. pelaksanaan advis teknis perijinan jasa konstruksi.
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jasa konstruksi serta mutu kontraktor dan konsultan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

D. Bidang Cipta Karya

Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Cipta Karya meliputi perencanaan teknis, pembangunan dan pengawasan teknis drainase dan sanitasi, pengendalian bangunan dan gedung serta penataan lingkungan dan pertamanan.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan dan menyusuna rencana kinerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengawasan teknis drainase dan sanitasi;

- c. perumusan kebijakan teknis pembangunan, pengendalian dan pengawasan bangunan dan gedung;
- d. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pembangunan drainase dan sanitasi;
- e. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, pengendalian dan pengawasan bangunan dan gedung;
- f. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan evaluasi penataan lingkungan dan pertamanan kota ;
- g. pengkoordinasian teknis perencanaan dan pengelolaan perkotaan dan fasilitas umum lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang;
- i. pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI);
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

D.1. Seksi Drainase dan Sanitasi

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup merencanakan, melaksanakan dan mengawasi teknis drainase dan sanitasi.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerjanya;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis drainase;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis sanitasi;

- d. perencanaan teknis, pelaksanaan fisik dan pengawasan teknis pembangunan dan pemeliharaan drainase dan saluran;
- e. perencanaan teknis, pelaksanaan fisik dan pengawasan teknis pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan perkotaan;
- f. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

D.2 Seksi Pengendalian Bangunan Gedung

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup merencanakan, melaksanakan dan mengawasi teknis pengendalian dan pengawasan bangunan gedung.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan dan menyusun rencana kerjanya;
- b. penyiapan Bahan dan menyusun kebijakan teknis penataan, pengendalian dan pengawasan bangunan dan bangunan gedung beserta lingkungannya;
- c. penataan pengendalian dan pengawasan bangunan dan bangunan gedung milik pemerintah, swasta dan masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan kajian teknis atas pengendalian dan pengawasan bangunan dan bangunan gedung beserta lingkungannya;
- e. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

D.3 Seksi Penataan Lingkungan dan Pertamanan

Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup merencanakan, melaksanakan dan mengawasi teknis penataan lingkungan dan penataan pertamanan kota.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan menyusun rencana kerjanya;
- b. Penyiapan bahan dan menyusun kebijakan teknis penataan lingkungan dan penataan pertamanan;
- c. Pelaksanaan penataan lingkungan perkotaan;
- d. pengelolaan dan penataan taman dan hutan dalam kota;
- e. penyediaan bibit dan tanaman untuk kepentingan pertamanan;
- f. pengkoordinasian pengelolaan taman milik perkantoran, swasta, lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan dalam kota;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan kajian teknis penataan lingkungan dan pertamanan;
- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

E. Bidang Sumber Daya Air

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Sumber Daya Air meliputi perencanaan teknis, pembangunan dan pengawasan teknis pengelolaan irigasi, sungai rawa dan pantai serta pengelolaan air bersih dan air limbah.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan menyusun rencana kinerja Bidang;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan irigasi;
- c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sungai, rawa dan pantai;
- d. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan air bersih dan air limbah;
- e. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan irigasi;
- f. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan sungai, rawa dan pantai;
- g. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan air bersih dan air limbah;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidangnya;
- i. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI);
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

E.1 Seksi Pengelolaan Irigasi

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup merencanakan, melaksanakan dan mengawasi teknis pengelolaan irigasi.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan menyusun rencana kerjanya;
- b. Penyiapan bahan dan menyusun kebijakan teknis pengelolaan irigasi;
- c. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pengelolaan irigasi;
- d. Pembimbingan dan pemeliharaan jaringan dan operasional irigasi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan kajian teknis pengelolaan irigasi;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan irigasi dengan pihak lain;
- g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

E.2. Seksi Sungai, Rawa dan Pantai

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup merencanakan, melaksanakan dan mengawasi teknis pengelolaan sungai, rawa dan pantai.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan menyusun rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan dan menyusun kebijakan teknis pengelolaan sungai rawa dan pantai beserta kawasannya;
- c. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pengelolaan sungai dan kawasannya;
- d. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pengelolaan daerah rawa;
- e. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pengelolaan kawasan pantai;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan kajian teknis pengelolaan sungai, rawa dan pantai;
- g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

E.3 Seksi Air Bersih dan Air Limbah

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup merencanakan, melaksanakan dan mengawasi teknis pendayagunaan air bersih dan pengelolaan air limbah.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan menyusun rencana kerjanya;
- b. Penyiapan bahan dan menyusun kebijakan teknis pendayagunaan air bersih;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pengelolaan air limbah;
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi pembangunan, peningkatan dan pendayagunaan air bersih;
- e. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pengelolaan air limbah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan kajian teknis pendayagunaan air bersih dan pengelolaan air limbah;
- g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

F. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. Pengkoordinasian kegiatan seksi-seksi dilingkungan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman agar terjalin hubungan kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi yang ada dibawahnya sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pengevaluasian tugas bawahan kepada Kepala Seksi yang dibawahnya sebagai bahan pembinaan karir yang bersangkutan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Pendataan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembangan perumahan untuk peningkatan sarana dan prasarana perumahan;
- h. Penyusunan bahan penetapan peraturan daerah, kebijakan strategis penanggulangan pemukiman kumuh/nelayan dan pencegahan timbulnya pemukiman kumuh diwilayah Kota Jayapura;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan peremajaan/perbaikan perumahan kumuh /nelayan dan rusunawa;

- j. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengendalian pemukiman dan perumahan Kota Jayapura;
- k. Penyiapan bahan penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional;
- l. Pengumpulan, pemutahiran dan penyimpanan data, dengan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan rumah formal dan rumah swadaya;
- m. Pelaksanaan konsultasi/koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan perumahan formal dan swadaya;
- n. Penyiapan bahan penetapan harga sewa perumahan, meneliti dan memproses izin penghunian perumahan, usaha pembangunan perumahan, izin layak huni, izin penggunaan bangunan serta izin usaha pengelolaan perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan);
- o. Penyusunan, penghimpunan dan pemeliharaan dokumen yang berhubungan dengan sip, surat izin usaha pembangunan perumahan, surat izin layak huni, surat izin penggunaan bangunan dan surat izin usaha perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan);
- p. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat umum tentang tata tertib penghunian, tertib pembangunan dan pemeliharaan bangunan perumahan, inventarisasi terhadap rumah-rumah dinas/rumah penguasaan pemerintah daerah, pengembangan perumahan dan pengusaha pengelola perumahan rumah sewa dan rumah kost (pondokan) dan pengurusan;
- q. Pelaksanaan pembinaan terhadap pengusaha/pengembang perumahan, pengelola / pengusaha rumah sewa dan rumah kost (pondokan);

- r. Pelaksanaan penelitian / telaah atas masalah gugatan perumahan serta penyiapan kawasan siap bangun dan pengkajian atas kebutuhan perumahan formal dan swadaya;
- s. Pelaksanaan pendaftaran dan pemberian informasi / data tentang ketersediaan dan kebutuhan perumahan bagi masyarakat;
- t. Pelaksanaan pengawasan untuk mencegah timbulnya sengketa dibidang perumahan formal dan swadaya;
- u. Pelaksanaan penertiban perumahan dalam rangka penyelesaian permasalahan penghunian perumahan dan pengendalian kegiatan pembangunan perumahan;
- v. Pemberian saran dan pertimbangan terhadap pencabutan dan pengalihan / pembebasan, perumahan yang ber sip, pemindahan terhadap penyelenggaraan izin usaha pengelolaan perumahan;
- w. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Kota; dan
- x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

F.1 Seksi Penyediaan Perumahan Dan Pengendalian Kawasan Perumahan Kumuh

Seksi Penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan kumuh mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perumahan lingkup persediaan perumahan dan pengendalian kawasan pemukiman kumuh.

Untuk melaksanakan tugas sebagian dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Kawasan Perumahan Kumuh mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang;

- b. Penyusunan pedoman teknis penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan;
- c. Pelaksanaan diseminasi dan penerapan system manajemen mutu penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan;
- d. Pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan;
- g. Pelaksanaan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala bidang.

F.2 Seksi Penyuluhan, Perizinan dan Penertiban Perumahan Kumuh

Seksi Penyuluhan, Perizinan dan Penertiban Perumahan Kumuh mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan lingkup Penyuluhan, Perizinan dan Penertiban Perumahan Kumuh.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan, Perizinan dan Penertiban Perumahan Kumuh mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana penyuluhan, perizinan dan penertiban perumahan sesuai dengan rencana kerja Dinas;

- b. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan penyuluhan, perizinan dan penertiban perumahan;
- c. Pelaksanaan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian perizinan serta penertiban perumahan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang.

F.3 Seksi Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Seksi Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan penataan prasarana, sarana dan utilitas umum dan pengembangan penataan kawasan permukiman;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pengembangan penataan prasarana, sarana dan utilitas umum dan penatan kawasan permukiman dan pemakaman di wilayah Kota Jayapura;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan penataan prasarana, sarana dan utilitas umum pada Kota Jayapura dan Penataan Kawasan Permukiman dan Pemakaman di Wilayah Kota Jayapura;
- c. Penyusunan pedoman dan manual, perencanaan, pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- d. Pelaksanaan pembangunan rusunawa dan rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- e. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya penataan kawasan permukiman dan pemakaman kumuh di wilayah Kota Jayapura;
- f. Penyelenggaraan penanganan penataan kawasan permukiman dan pemakaman perkotaan di Kota Jayapura;
- g. Pelaksanaan pengelolaan peremajaan/perbaiki penataan kawasan permukiman dan pemakaman;
- h. Perencanaan, penyiapan lahan, menata pemakaman, dan pengadaan serta pengolahan perlengkapan dan peralatan pemakaman;
- i. Pelaksanaan registrasi kegiatan pendaftaran, pencatatan berkala dan membuat pedoman pemanfaatan tempat pemakaman umum;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kawasan dan pemakaman kumuh di Kota Jayapura;
- k. Pelaksanaan evaluasi program penataan kawasan permukiman dan pemakaman di Kota Jayapura;
- l. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah, kebijakan dan strategi pembangunan kawasan permukiman dan pemakaman di wilayah Kota Jayapura;
- m. Penyiapan Bahan Penyelenggaraan pembangunan penataan kawasan permukiman dan pemakaman nasional;
- n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan pemakaman di wilayah Kota Jayapura;

- o. Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, RUSUN dan RUSUS;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- r. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengembangan fasilitas umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

G. Bidang Penataan Ruang

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang penataan ruang yang meliputi perencanaan penataan ruang, pengaturan dan pembinaan tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, serta pengawasan dan evaluasi tata ruang.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kinerja Bidang;
- b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, pengendalian Pemanfaatan serta pengawasan dan evaluasi tata ruang;
- c. Penyusunan dan mengendalikan standar operasional dan prosedur (SOP) di bidang penataan ruang;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan detail tata ruang;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- g. Pengkoordinasian n pengawasan dan evaluasi tata ruang;

- h. Pelaksanaan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tata ruang Kota;
- i. Pelaksanaan bantuan teknis kepada instansi terkait terhadap penyelenggaraan pembangunan gedung negara/daerah;
 - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penataan ruang;
 - b. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - a. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

G.1 Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan menyusun rencana kerjanya;
- b. Penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- c. Penyusunan rencana detail dan rencana teknis tata ruang;
- d. Pengaturan dan pembinaan rencana penataan ruang kota;
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan rencana tata ruang;
- f. Pengkoordinasian perencanaan tata ruang;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

G.2 Seksi Pelaksanaan Pemanfaatan Tata Ruang

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang di lingkup pengendalian dan pemanfaatan tata ruang.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan menyusun rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tata ruang;
- c. Pelaksanaan pemanfaatan tata ruang;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemanfaatan tata ruang;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan tata ruang;
- f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

G.3 Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup pengawasan dan evaluasi tata ruang.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan menyusun rencana kerja;

- b. Penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan tata ruang;
- c. Pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- d. Pelaksanaan evaluasi atas Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang;
- e. Pengkoordinasian Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

H. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Berkedudukan dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas.

Tugas :

Menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang meliputi penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan, penyuluhan , perizinan dan penertiban perumahan kumuh serta penataan prasarana utilitas umum.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan program kerja bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja
- b. Pengkoordinasian kegiatan seksi-seksi dilingkungan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman agar terjalin hubungan kerjasama dalam pelaksanaan tugas;

- c. Pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi yang ada dibawahnya sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pengevaluasian tugas bawahan kepada Kepala Seksi yang dibawahnya sebagai bahan pembinaan karir yang bersangkutan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Pendataan fasilitas umum dan fasilitas social bagi pengembangan perumahan untuk peningkatan sarana dan prasarana perumahan;
- h. Penyusunan bahan penetapan peraturan daerah, kebijakan strategis penanggulangan pemukiman kumuh/nelayan dan pencegahan timbulnya pemukiman kumuh diwilayah kKota Jayapura;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan peremajaan/perbaikan perumahan kumuh /nelayan dan rurunawa
- j. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengendalian pemukiman dan perumahan kota jayapura;
- k. Penyiapan bahan penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional;
- l. Pengumpulan, pemutahiran dan penyimpanan data, dengan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan rumah formal dan rumah swadaya;
- m. Pelaksanaan konsultasi/koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan perumahan formal dan swadaya;

- n. Penyiapan bahan penetapan harga sewa perumahan, meneliti dan memproses izin penghunian perumahan, usaha pembangunan perumahan, izin layak huni, izin penggunaan bangunan serta izin usaha pengelolaan perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan);
- o. Penyusunan, penghimpunan dan pemeliharaan dokumen yang berhubungan dengan sip, surat izin usaha pembangunan perumahan, surat izin layak huni, surat izin penggunaan bangunan dan surat izin usaha perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan);
- p. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat umum tentang tata tertib penghunian, tertib pembangunan dan pemeliharaan bangunan perumahan, inventarisasi terhadap rumah-rumah dinas/rumah penguasaan pemerintah daerah, pengembangan perumahan dan pengusaha pengelola perumahan rumah sewa dan rumah kost (pondokan) dan pengurusan;
- q. Pelaksanaan pembinaan terhadap pengusaha/pengembang perumahan, pengelola / pengusaha rumah sewa dan rumah kost (pondokan);
- r. Pelaksanaan penelitian / telaan atas masalah gugatan perumahan serta penyiapan kawasansiap bangun dan pengkajian atas kebutuhan perumahan formal dan swadaya;
- s. Pelaksanaan pendaftaran dan pemberian informasi / data tentang ketersediaan dan kebutuhan perumahan bagi masyarakat;
- t. Pelaksanaan pengawasan untuk mencegah timbulnya sengketa dibidang perumahan formal dan swadaya;
- u. Pelaksanaan penertiban perumahan dalam rangka penyelesaian permasalahan penghunian perumahan dan pengendalian kegiatan pembangunan perumahan;

- v. Pemberian saran dan pertimbangan terhadap pencabutan dan pengalihan / pembebasan, perumahan yang ber sip, pemindahan terhadap penyelenggaraan izin usaha pengelolaan perumahan;
- w. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang berada dibawah kewenangan pemerintah Kota; dan
- x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

H.1. Seksi Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Pengendalian Kawasan Pemukiman

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas bidang perumahan lingkup persediaan perumahan dan pengendalian kawasan pemukiman kumuh

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Penyusunan pedoman teknis penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan;
- c. Pelaksanaamn diseminasi dan penerapan system manajemen mutu penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan
- d. Pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan;

- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan;
- g. Pelaksanaan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan penyediaan perumahan dan pengendalian kawasan perumahan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala bidang

H.2. Seksi Penyuluhan, Perijinan dan Penertiban Perumahan Kumuh

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas bidang perumahan lingkup Penyuluhan, Perizinan dan penertiban perumahan kumuh.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana penyuluhan, perizinan dan penertiban perumahan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan penyuluhan, perizinan dan penertiban perumahan;
- c. Pelaksanaan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian perizinan serta penertiban perumahan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang.

H.3 Seksi Penataan Prasarana Utilitas Umum

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan penataan prasarana, sarana dan utilitas umum dan pengembangan penataan kawasan permukiman

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pengembangan penataan prasarana, sarana dan utilitas umum dan penatan kawasan permukiman dan pemakaman di wilayah Kota Jayapura;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan penataan prasarana, sarana dan utilitas umum pada Kota Jayapura dan Penataan Kawasan Permukiman dan Pemakaman di Wilayah Kota Jayapura;
- c. Penyusunan pedoman dan manual, perencanaan, pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. Pelaksanaan pembangunan rusunawa dan rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, fasilitas umum dan fasilitas social;
- e. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerahtentang pencegahan timbulnya penataan kawasan permukiman dan pemakaman kumh di wilayah Kota Jayapura;
- f. Penyelenggaraan penanganan penataan kawasan permukiman dan pemakaman perkotaan di kota jayapura;

- g. Pelaksanaan pengelolaan peremajaan/perbaikiakan penataan kawasan permukiman dan pemakaman;
- h. Perencanaan, penyiapan lahan, menata pemakaman, dan pengadaan serta pengolahan perlengkapan dan peralatan pemakaman;
- i. Pelaksanaan registrasi kegiatan pendaftaran, pencatatan berkala dan membuat pedoman pemanfaatan tempat pemakaman umum;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kawasan dan pemakaman kumuh di Kota Jayapura;
- k. Pelaksanaan evaluasi program penataan kawasan permukiman dan pemakaman di Kota Jayapura;
- l. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah, kebijakan dan strategi pembangunan kawasan permukiman dan pemakaman di wilayah Kota Jayapura;
- m. Penyiapan Bahan Penyelenggaraan pembangunan penataan kawasan permukiman dan pemakaman nasional;
- n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan pemakaman di wilayah Kota Jayapura;
- o. Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulant di RSH, RUSUN dan RUSUS;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- r. Pelaksanaan koordinas pengelolaan pengembangan fasilitas umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura Kota Jayapuramempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas

Sekretaris

- ↳ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- ↳ Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- ↳ Sub Bagian Keuangan

Bidang Bina Marga, terdiri atas

- ↳ Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan
- ↳ Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- ↳ Seksi Jasa Konstruksi

Bidang Cipta Karya, terdiri atas :

- ↳ Seksi Drainase dan Sanitasi
- ↳ Seksi Pengendalian Bangunan dan Gedung
- ↳ Seksi Penataan Lingkungan dan Pertamanan

Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :

- ↳ Seksi Irigasi
- ↳ Seksi Sungai Rawa dan Pantai
- ↳ Seksi Air Bersih dan Air Limbah

Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, terdiri atas :

- ↳ Seksi Prasarana, sarana dan Utilitas Umum
- ↳ Seksi Penyediaan Perumahan & Pengawasan Kawasan Perumahan Kumuh

- ↳ Seksi Penyuluhan, Perizinan & Penertiban Perumahan Kumuh

Bidang Penataan Ruang, terdiri atas :

- ↳ Seksi Pengaturan dan Pembinaan
- ↳ Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
- ↳ Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang

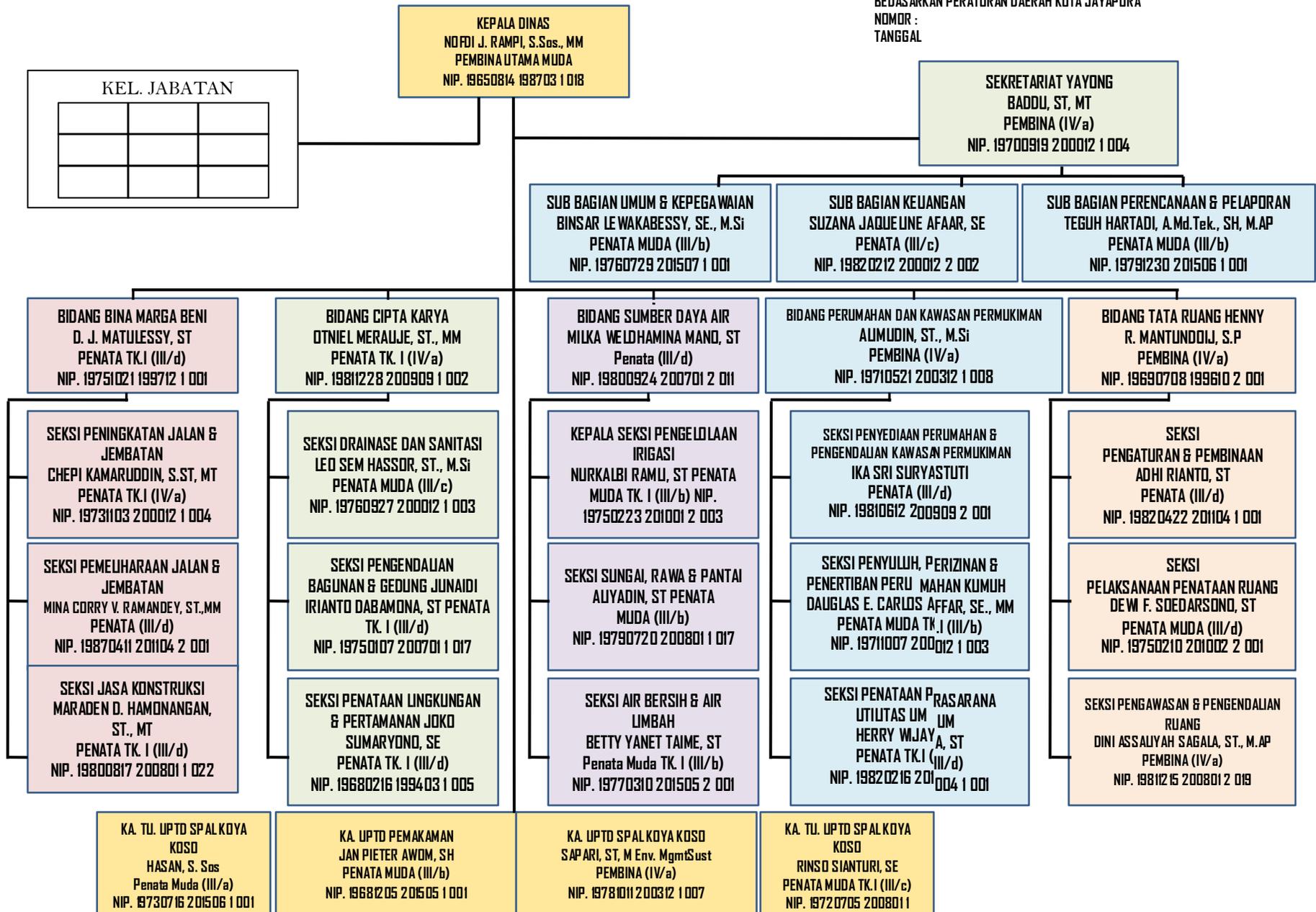
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.2 Struktur Organisasi

Pada laporan kinerja ini, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada lampiran UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

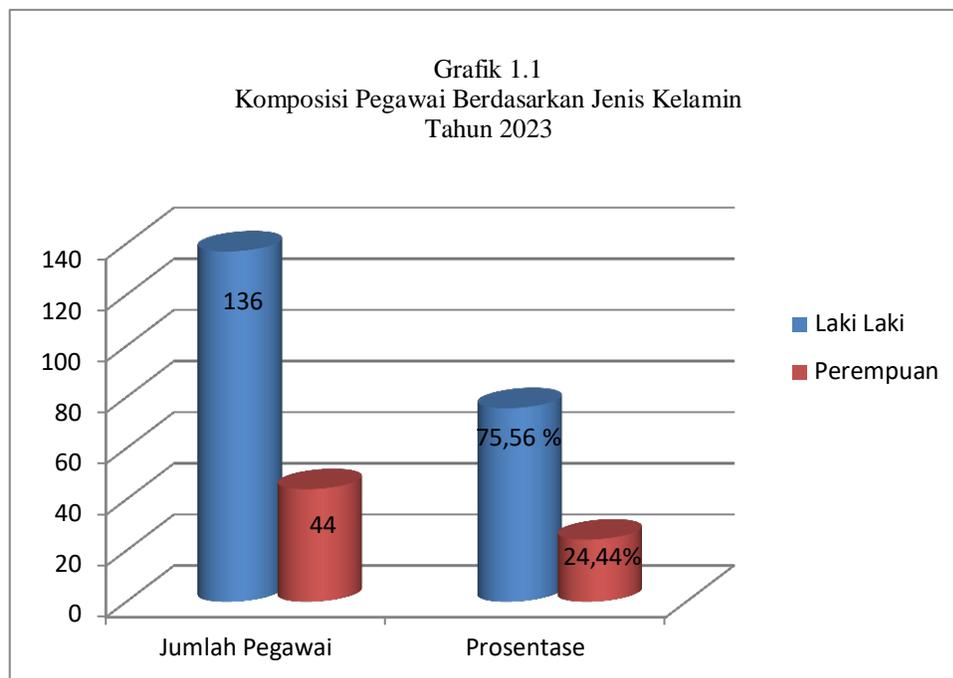
Adapun struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Dinas hingga Kepala Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan sebagaimana gambar struktur organisasi berikut:



1.3.3 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura

1.3.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 180 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 44 orang (24,44 %) perempuan dan 136 orang (75,56 %) laki-laki. Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 51,11% namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.



Sumber : Sub Bag. Kepegawaian Dinas PUPRPKP Kota Jayapura

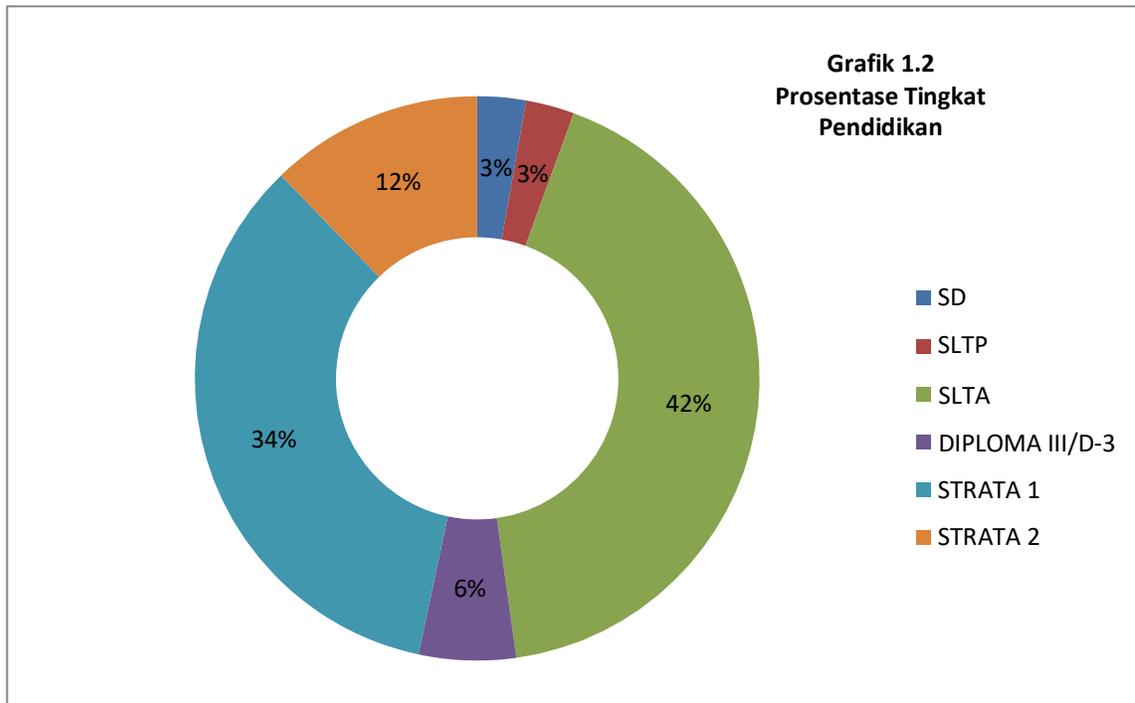
Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
**Keseluruhan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Jayapura**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	5	2,78
2	SLTP	5	2,78
3	SLTA	76	42,22
4	DIPLOMA III/ D-3	10	5,56
5	STRATA 1	62	34,44
6	STRATA 2	22	12,22
	JUMLAH	180	100%

Sumber : Subag Umum dan Kepeg. Dinas PUPRPKP Kota Jayapura

Dilihat dari segi pendidikan, Keseluruhan komposisi pegawai Dinas PUPRPKP Kota Jayapura cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Infrastruktur 34% pegawai sudah berpendidikan sarjana, 5% Diploma, namun masih terdapat tamatan SD sebanyak 2 % Tamatan SMP 2% dan tamatan SLTA sebanyak 42% yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai di kelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini:



Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

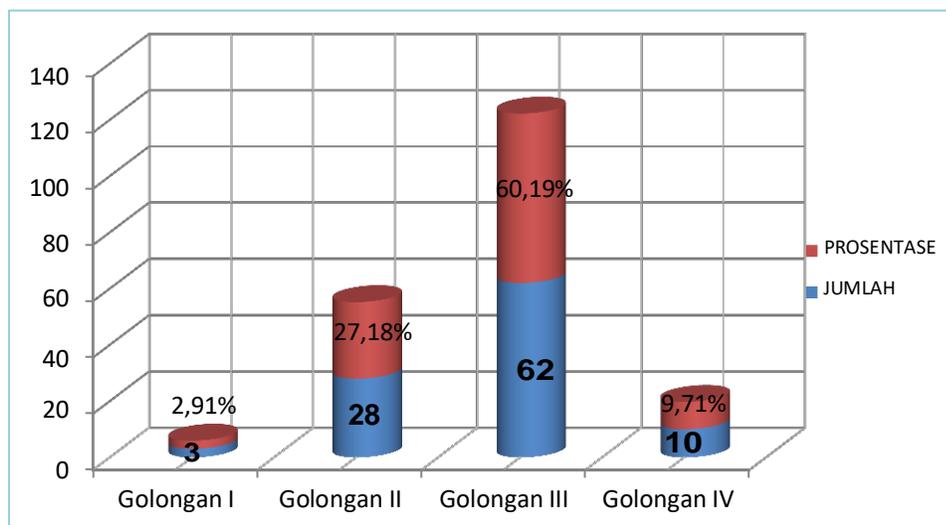
Tabel 1.2
Golongan ASN Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura

No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	3	2,91
2	Golongan II	28	27,18
3	Golongan III	62	60,19
4	Golongan IV	10	9,71
Jumlah		103	100

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 60% pegawai Dinas PUPRPKP Kota Jayapura adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun.

Berikut jumlah PNS Dinas PUPRPKP Kota Jayapura per golongan:

Grafik 1.3
Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan



Komposisi pegawai pada masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.3.
Pegawai Per Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura

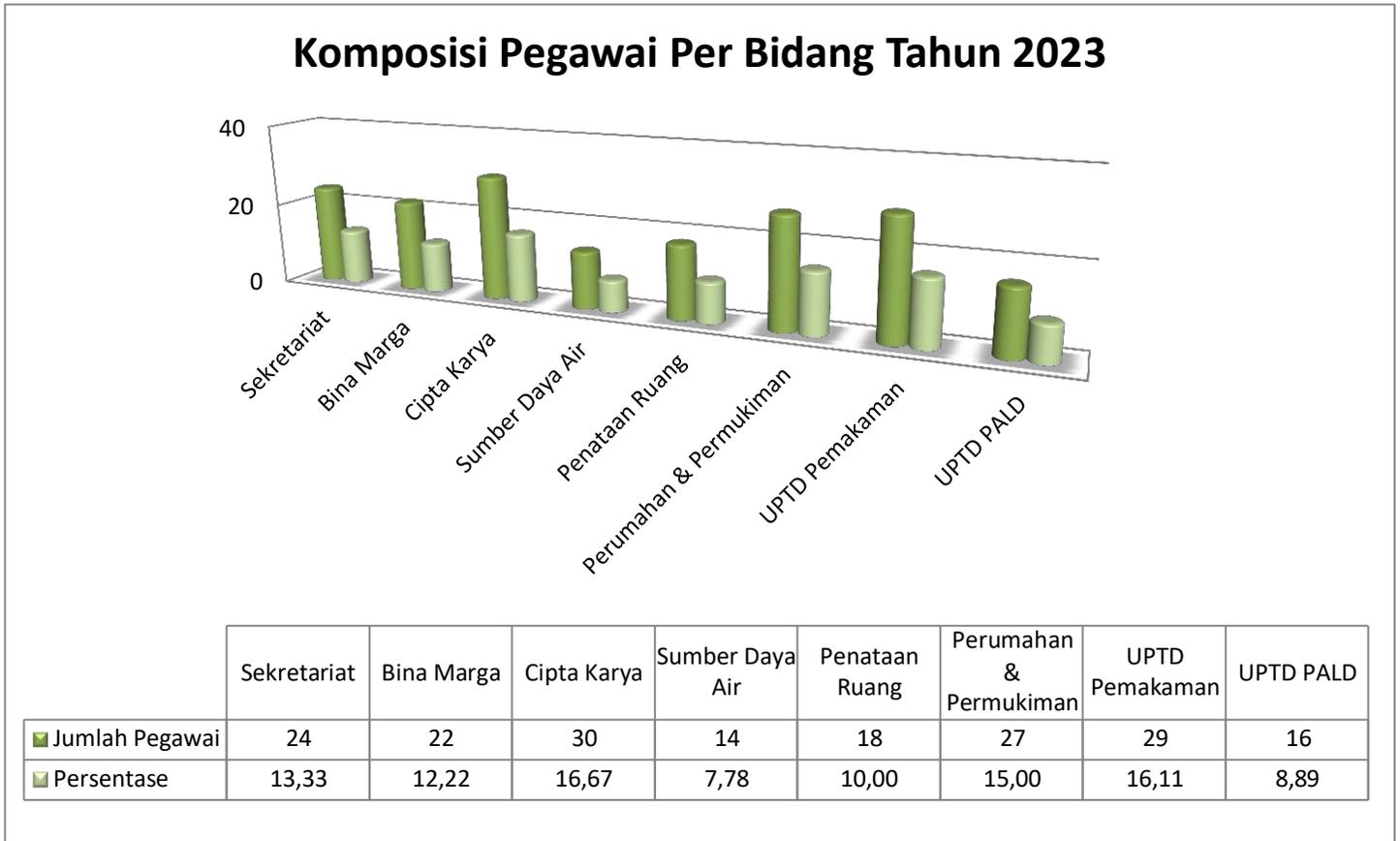
NO	Bidang	Jumlah	Persentase
1	Sekretariat	24	13,33
2	Bidang Bina Marga	22	12,22
3	Bidang Cipta Karya	30	16,67
4	Bidang Sumber Daya Air	14	7,78
5	Bidang Penataan Ruang	18	10,00
6	Bidang Perumahan & Permukiman	27	15,00
7	UPTD Pemakaman	29	16,11
8	UPTD PALD	16	8,89
	JUMLAH	180	100%

Sumber: Subag. Umum dan Kepegawaian Dinas PUPRPKP Kota Jayapura

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 16% pegawai berada di Bidang Cipta Karya dan UPTD Pemakaman, sedangkan jumlah pegawai yang ditempatkan pada masing-masing bidang 15% ke bawah. Sehingga perlu

adanya Pemerataan Penempatan pegawai pada masing-masing bidang untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Dinas PUPRKP Kota Jayapura. Secara grafik komposisi pegawai per bidang dapat dilihat di bawah ini:

Grafik 1.4.



1.3.3.2 Anggaran

Pelaksanaan Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Tahun Anggaran 2023 didukung oleh Dana APBD Pemerintah Kota Jayapura sebesar **Rp. 97.671.362.078,00** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 10.610.767.000,00** dan belanja langsung sebesar **Rp. 87.060.595.078,00**.

Adapun realisasinya pada akhir Desember 2023 untuk belanja tidak langsung sebesar **Rp. 9.873.453.363,00 (93,05%)** sedangkan realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 81.757.546.412,00 (93,91%)**. Jumlah total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung per Desember 2023 sebesar **Rp. 91.630.999.775,00 (93,82%)**.

1.3.3.3 Inventarisasi Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Kurang memadai untuk mendukung Pekerjaan di Bidang Infrastruktur. Nilai aset yang dikelola per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.579.560.966,- terdiri atas aset tetap sebesar Rp. 4.579.560.966,- dan aset lainnya Rp. 0,-. Sarana dan prasarana yang dikelola per Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.4.
Sarana Dan Prasarana Yang Dikelola
Per Desember 2023

No	Jenis Barang	Jumlah
I.	ASET TETAP	
1	- Golongan Peralatan dan Mesin	685 unit
	- Alat-alat angkutan	30 unit
	- Komputer	52 unit
II.	ASET LAINNYA	
1	Aset tidak bermanfaat	- unit

Sumber : Kartu Inventaris Barang Dinas PUPRPKP Kota Jayapura

1.3.3.4 Sarana dan Prasarana

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura belum dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung, sudah memiliki gedung yang memadai untuk menampung pelaksanaan tugas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura. Selain itu,.

Sarana dan prasarana Alat berat dan truck serta kendaraan pengawasan sangatlah kurang, sehingga pekerjaan pengawasan dan infrastruktur kadang terkendala dilapangan. Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas PUPRPKP asset yang terlihat dalam tabel 1.5 dibawah:

Tabel 1.5.
Daftar Asset
Dinas PUPRPKP Kota Jayapura
Tahun 2023

NO	JENIS ASET BARANG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 2	15	Unit	Kendaraan Roda
2	Kendaraan Roda 3	2	Unit	Empat :
3	Kendaraan Roda 4	5	Unit	5 unit, Terdiri dari
4	Kendaraan Roda 6	6	Unit	Kijang Inova 1 unit;
5	Alat Berat	5	Unit	1 Unit Ford Ranger
6	Meja 1 Biro	30	Unit	
7	Meja 1/2 Biro	89	Unit	Kendaraan Roda

8	Meja Komputer	11	Unit	Enam : Jenis Dumb Truck 3 unit
9	Lemari 1 Biro	50	Unit	
10	Lemari 1/2 Biro	4	Unit	
11	Sofa	7	Unit	
12	Kursi 1 Biro	27	Unit	Alat Berat : Jenis Excavator 3 Unit, terdiri dari Excavator besar 1 unit dan Excavator mini 2 unit ditambah Baby Roller 1 Unit
13	Kursi 1/2 Biro	136	Unit	
14	Filling Kabinet	16	Unit	
15	AC	18	Unit	
16	UPS	8	Unit	
17	Komputer PC	21	Unit	
18	Laptop	20	Unit	
19	Printer	48	Unit	
20	Televisi	3	Unit	
21	Kulkas	2	Unit	
22	Kipas Angin	3	Unit	
23	Brankas	4	Unit	
24	Penghancur Kertas	2	Unit	
25	Mesin Babat	16	Unit	
26	Mesin Chain Showw	1	Unit	
27	Braker	2	Unit	
28	Jack Hammer	2	Unit	
29	Hammer Test	1	Unit	
30	Genset	1	Unit	
31	GPS	2	Unit	
32	Kamera	3	Unit	
33	Proyektor	1	Unit	
34	HT	9	Unit	
35	Mesin Ketik	2	Unit	
36	Absen Digital	1	Unit	
37	Core Drill	1	Unit	
38	CPU	7	Unit	
39	Dispencer	6	Unit	
40	Hardisk	1	Unit	
41	Monitor Komputer	5	Unit	

42	Rak Arsip	6	Unit	
43	Sensor	3	Unit	
44	Stafol	2	Unit	
45	Tangga	2	Unit	
46	Telepon/Fax	1	Unit	
47	Pompa Air	1	Unit	
48	Tandon	1	Unit	
49	Alat Penyemprot Disinfektan	2	Unit	
50	Sepatu Boot/Sepatu Lapangan	14	Pasang	
51	Bangunan Gedung	1	Unit	575,30 M2

Sumber : Data asset Dinas PUPRPKP Kota Jayapura Tahun 2023

1.4. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jayapura Tahun 2023 – 2026

1.5 Isu Strategis

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura, meliputi:

- 1) Masih tingginya penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya serta tuntutan penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat diutamakan untuk memenuhi kebutuhan jaringan jalan yang sudah ada (eksisting) sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan kota Jayapura, yang meliputi :
 - a. meningkatnya kualitas layanan jalan kondisi baik kota Jayapura
 - b. tersedianya konektivitas wilayah kota Jayapura
- 2) Sarana dan prasarana infrastruktur yang belum memenuhi syarat baik dari segi jumlah.
- 3) Penyediaan Sarana SR Air Minum

- 4) Pengelolaan Air Limbah Permukiman (Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai)
- 5) Tingginya pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukan, terutama di daerah sempadan kali sebagai tempat hunian
- 6) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang infrastruktur
- 7) Tidak maksimalnya Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha yang merupakan wewenangan pemerintah Kab/Kota
- 8) Berkembangnya aktifitas pengembangan lahan untuk kawasan pemukiman dimana Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman belum dilaksanakan maksimal.
- 9) Tingkat Partisipasi masyarakat yang belum optimal.
- 10) Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi memungkinkan tuntutan Infrastruktur meningkat
- 11) Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan perubahan sosial ekonomi.

Dari Permasalahan tersebut di atas Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman berfokus pada isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan air minum permukiman
2. Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah,) pemukiman perkotaan
3. Layanan jaringan drainase
4. Pengurangan kawasan kumuh

5. Penataan Ruang Kota Jayapura

1.6 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mendeskripsikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman selama Tahun 2023. Capaian Kinerja (performance results) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. **BAB I : Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2023, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penulisan Laporan Kinerja.

2. **BAB II : Perencanaan Kinerja**

Memuat perencanaan strategis 2023-2026, indikator kinerja utama 2023-2026, Rencana Kerja Tahunan 2023 dan perjanjian kinerja tahun 2023.

3. **BAB III : Akuntabilitas Kinerja,**

Menjelaskan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.

4. BAB IV : Penutup

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut dihubungkan dengan masa transisi sebelum Kepala Daerah Definitif terpilih maka terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis

Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura dibuat pada masa Penjabat Walikota, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jayapura.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Renstra Kota Jayapura Tahun 2023-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD, Forum SKPD, sehingga RPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Jayapura dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Jayapura sebagai Kota Jasa yang Beriman, Maju, Mandiri Dan Sejahtera.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura Tahun 2023 – 2026 mengacu pada Visi dan Misi Penjabat Walikota terpilih yaitu : **“Masyarakat Kota Jayapura Yang Beriman, Maju, Mandiri Dan Sejahtera”** sesuai dengan Visi RPJPD Kota Jayapura yang menjadi acuan sebelum kepala Daerah Definitif Terpilih

2.1.2 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Penjabat Walikota Terpilih ada 6 (enam) Misi yang mengacu pada RPJPD Kota Jayapura dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura masuk dalam misi ke 2 sampai 4 dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Kota Jayapura yang Bersih, Indah, Lestari, Manusiawi, Aman dan Nyaman
- 2) Mewujudkan Kota Jayapura Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa

3) Membangun Tata Pemerintahan Yang Baik (good governance)

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan Empat tahun. Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura tahun 2023-2026. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Hubungan Hierarkis Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Masyarakat Kota Jayapura Yang Beriman,Maju, Mandiri Dan Sejahtera			
No	MISI II	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan Kota Jayapura yang Bersih, Indah, Lestari, Manusiawi, Aman dan Nyaman.	1. Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan	1. Tersedianya Taman Kota yang nyaman dan aman 2. Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW
		2. Meningkatnya Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan	1. Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi 2. Peningkatan Akses Layanan Drainase kawasan Perkotaan

		3. Meningkatnya ketersediaan perumahan dan permukiman dan penduduk yang layak huni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan Air Baku dan Air Minum 2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi 3. Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
--	--	--	---

Visi : Masyarakat Kota Jayapura Yang Beriman,Maju, Mandiri Dan Sejahtera			
No	MISI III	TUJUAN	SASARAN
2	Mewujudkan Kota Jayapura Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa	Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Jalan	Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Jalan

Visi : Masyarakat Kota Jayapura Yang Beriman,Maju, Mandiri Dan Sejahtera			
No	MISI IV	TUJUAN	SASARAN
3	Membangun Tata Pemerintahan Yang Baik (good governance)	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	1) Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Periode 2023-2026,

maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

Perlu diketahui bahwa ada perubahan pada Strategi dan arah kebijakan yang kami terapkan, hal ini dikarenakan pada RPJMD periode 2018 – 2022 telah berakhir sehingga Dinas PUPRKP mengacu pada RPJPD dan menyusun Renstra periode Tahun 2023 – 2026 yang mengakibatkan Misi disesuaikan dengan RPJPD yaitu berada pada misi Kedua sampai Keempat.

Adapun strategi dan arah kebijakan tersebut dapat digambarkan dalam table 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan	1) Tersedianya Taman Kota yang nyaman dan aman	Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang
	2) Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW		
Meningkatnya Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan	Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi	Pembangunan Infrastruktur Pengaman untuk wilayah rawan bencana	Mengurangi Potensi bencana
	Peningkatan Akses Layanan Drainase kawasan Perkotaan	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi Drainase	Mewujudkan ketersediaan prasarana Drainase yang baik
Meningkatnya ketersediaan perumahan dan permukiman dan penduduk yang layak huni	Meningkatnya ketersediaan Air Baku dan Air Minum	Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat	Penyediaan sarana jaringan air bersih

	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi	Menyediakan Irigasi untuk lahan pertanian masyarakat	Penyediaan sarana jaringan Irigasi
	Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Permukiman	Menyediakan sarana dan Prsarana Pengelolaan Air Limbah	Penyediaan sarana dan Prsarana MCK yang layak
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Penataan dan pengembangan perumahan dan fasilitas permukiman	Menata dan mengembangkan perumahan dan permukiman layak bagi masyarakat
Meningkatnya sistem transportasi yang terintegrasi	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas dalam menunjang aktifitas social dan ekonomi masyarakat
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik'	Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik	Meningkatnya Manajemen Peleyanan Publik

5.5.1. Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi Kedua : Mewujudkan Kota Jayapura yang Bersih, Indah, Lestari, Manusiawi, Aman dan Nyaman; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2023-2026 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua

VISI : Masyarakat Kota Jayapura Yang Beriman,Maju, Mandiri Dan Sejahtera			
MISI II : Mewujudkan Kota Jayapura yang Bersih, Indah, Lestari, Manusiawi, Aman dan Nyaman			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan	1) Tersedianya Taman Kota yang nyaman dan aman	Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang
	2) Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW		
2. Meningkatnya Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan	1. Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi	Pembangunan Infrastruktur Pengaman untuk wilayah rawan bencana	Mengurangi Potensi bencana
	2. Peningkatan Akses Layanan Drainase kawasan Perkotaan	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi Drainase	Mewujudkan ketersediaan prasarana Drainase yang baik
3. Meningkatnya ketersediaan perumahan dan permukiman dan penduduk yang layak huni	1. Meningkatnya ketersediaan Air Baku dan Air Minum	Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat	Penyediaan sarana jaringan air bersih
	2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi	Menyediakan Irigasi untuk lahan pertanian masyarakat	Penyediaan sarana jaringan Irigasi
	3. Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Pemukiman	Menyediakan sarana dan Prsarana Pengelolaan Air Limbah	Penyediaan sarana dan Prsarana MCK yang layak
	4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Penataan dan pengembangan perumahan dan fasilitas permukiman	Menata dan mengembangkan perumahan dan permukiman layak bagi masyarakat

5.5.2. Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan Misi Ketiga : Mewujudkan Kota Jayapura Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2023-2026 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga

VISI : Terwujudnya Kota Jayapura Yang Beriman, Bersatu, Mandiri, Sejahtera dan Modern Berbasis Kearifan Lokal			
MISI III : Mewujudkan Kota Jayapura Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya sistem transportasi yang terintegrasi	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas dalam menunjang aktifitas social dan ekonomi masyarakat

5.5.3. Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Keempat

Dalam mewujudkan Misi Keempat : Membangun Tata Pemerintahan Yang Baik (good governance); maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2023-2026 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4

Strategi dan Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga

VISI : Terwujudnya Kota Jayapura Yang Beriman, Bersatu, Mandiri, Sejahtera dan Modern Berbasis Kearifan Lokal			
MISI IV : Membangun Tata Pemerintahan Yang Baik (good governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik'	Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Publik

2.1.5 Program dan Kegiatan

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang Infrastruktur dalam RPD Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2023-2026. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi kedua sampai Misi Keempat RPD 2023-2026 Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang menjadi program prioritas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura adalah:

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Secara keseluruhan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura tahun 2023-2026 telah mengacu pada RPD Pemerintah Kota Jayapura. Renstra Dinas telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPD Pemerintah Kota Jayapura, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penataan Bangunan Gedung
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
5. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
8. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
9. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
10. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh
11. Program Pengembangan Perumahan
12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
13. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
14. Program Penataan Bangunan Gedung
15. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jayapura, maka dalam Rencana

Strategis 2023-2026 telah ditetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Jayapura telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rumusan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Jayapura Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	SUMBER DATA
1. Tersediannya Sarana dan Prasarana Peribadatan	Jumlah Bangunan yang Nyaman untuk tempat Beribadah dalam kondisi baik (Unit)	$\frac{\text{Realisasi Kegiatan Infrastruktur Khusus Fasilitas Rumah Ibadah}}{\text{Taget Kegiatan Infrastruktur Khusus Fasilitas Rumah Ibadah}} \times 100$	Bidang Cipta Karya
2. Terwujudnya Ruang Kota yang aman dan nyaman	Prosentase Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas Taman Yang diKelola}}{\text{Luas Taman Kota di Kota Jayapura}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya

3. Peningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	$\frac{\text{Luas Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang}}{\text{Wilayah Rencana Tata Ruang}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang
4. Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi	Proporsi pengurangan Wilayah Rawan Bencana	$\frac{\text{Jumlah Volume Infrastruktur Penanggulangan Bencana Terlaksana}}{\text{Jumlah Wilayah Rawan Bencana}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Air & Cipta Karya
5. Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum	proporsi ketersediaan Air baku	$\frac{\text{proporsi ketersediaan Air baku}}{\text{Ketersediaan Air Baku}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya
	Proporsi jumlah masyarakat yang mengakses air minum	$\frac{\text{Penduduk Berakses Air Minum}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Jayapura}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya
6. Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Pemukiman	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang terlayani tangki Septic/MCK}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Jayapura}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya
7. Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun	$\frac{\text{Rumah Kumuh yang Tertangani}}{\text{Jumlah Rumah Kumuh di Kota Jayapura}} \times 100\%$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Jalan	Ratio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	$\frac{\text{Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan Kota Jayapura}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga
9. Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Realisasi Kegiatan Rutin}}{\text{Total Jumlah kegiatan Rutin}} \times 100$	Sub Bagian Keuangan

Tabel 2.7

SATUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
1 Tersediannya Sarana dan Prasarana Peribadatan	Jumlah Bangunan yang Nyaman untuk tempat Beribadah dalam kondisi baik	Presen
2 Terwujudnya Ruang Kota yang aman dan nyaman	Prosentase Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik	Presen
3 Peningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen
4 Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi	Proporsi pengurangan Wilayah Rawan Bencana	Persen
5 Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum	proporsi ketersediaan Air baku	Persen
	Proporsi jumlah masyarakat yang mengakses air minum	Persen
6 Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Pemukiman	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen
7 Tersediannya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun	Unit
8 Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Jalan	Ratio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Persen
9 Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM

2.3 Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tahun 2023

	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target 2023
1	2	3	4	5
	Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama	Tersediannya Sarana dan Prasarana Peribadatan	Jumlah Bangunan yang Nyaman untuk tempat Beribadah dalam kondisi baik	4 Unit
1	Meningkatnya Ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan	1) Terwujudnya Ruang Kota yang aman dan nyaman	Prosentase RTH	0,002%
			Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik	1,21 Ha
		2) Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	26,36%
2	Meningkatnya Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan	1) Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi	Proporsi pengurangan Wilayah Rawan Bencana	3,94%
3	Meningkatnya ketersediaan perumahan dan permukiman dan penduduk yang layak huni	1) Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum	proporsi ketersediaan Air baku	3,86%
			Proporsi jumlah masyarakat yang mengakses air minum	18,07%
		2) Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Permukiman	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	3,87%
		3) Tersediannya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun	2503 Unit
4	Meningkatnya sistem transportasi yang terintegrasi	1) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan	Ratio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0,20%
5	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	1) Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	68

sumber Data : PK Esalon II Tahun 2023 Dinas PUPRKP

Tabel 2.9
Indikator Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2023-2026
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kota Jayapura

INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Taman Kota dalam kondisi baik yang dikelola (Ha)	56.02	56.02	61.62	67.78	74.56	74.56
Ratio Bangunan Ber IMB Persatuan Bangunan	11.03	11.13	11.18	11.23	11.29	11.29
Ratio Kepatuhan IMB Kab/Kota	11.96	19.05	19.17	19.33	19.50	19.50
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	4.27	4.53	4.81	5.12	5.46	5.46
Persentase Kawasan rawan bencana yang terlindungi infrastruktur pengaman (talud) da normalisasi sungai	3.62	3.68	3.75	3.82	3.90	3.90
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	21.36	43.42	43.86	44.48	45.20	45.20
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	9.54	24.71	34.69	45.79	58.05	58.05
Ratio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten /kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air domestik limbah	2.88	3.87	4.64	5.49	6.98	6.98
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Iluni)	3.57	3.01	2.65	2.26	1.87	1.87
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana	0	0.03	0.05	0.08	0.10	0.10

dan Utilitas Umum)						
Rasio rumah layak huni	12.10	12.12	12.13	12.14	12.16	12.16
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	59	61.65	63.82	65.60	67.57	67.57
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	6.94	6.84	6.78	6.65	6.65	6.65
jumlah Sarana dan Prasaran umum dalam Kondisi Baik	95,398	95,413	95,442	95,425	95.429	95,429
Tingkat Kcmantapan Jalan kabupaten /kota Penataan Ruang	22.07	45.67	61.49	78.77	97.64	97.64
Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0.24	0.48	0.82	1.22	1,82	1.82
Nilai SAKIP	75.15	76	77	79	80	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Tahun 2023

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Hijau
2	Baik	75.00 – 89.99	Biru Muda
3	Cukup	65.00 – 74.99	Oranye
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2023, telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- ▯ Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- ▯ Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- ▯ Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- ▯ Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- ▯ Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator
- ▯ Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator
- ▯ Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator
- ▯ Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator
- ▯ Sasaran 9 terdiri dari 1 indikator

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah No.30 Tahun 2022 Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Volume Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	PERHITUNGAN RUMUS	CAPAIAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Tersediannya Sarana dan Prasarana Peribadatan	Jumlah Bangunan yang Nyaman untuk tempat Beribadah dalam kondisi baik (Unit)	4 Unit	3 Unit	$\frac{3 \text{ Unit}}{4 \text{ Unit}} \times 100$	75 %
2	Tersedianya Taman Kota yang nyaman dan aman	Prosentase RTH	0,002%	0,003%	$\frac{0,003 \text{ Ha}}{0,002 \text{ Ha}} \times 100$	150%
		Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik	1,21 Ha	1,77 Ha	$\frac{1,77 \text{ Ha}}{1,21 \text{ Ha}} \times 100$	146%
3	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	26,36%	24.87%	$\frac{15.811}{16.753} \times 100$	94,37%

4	Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi	Proporsi pengurangan Wilayah Rawan Bencana	3,94%	3,84%	1.115,19 Ha ----- x 100 29.071 Ha	97,43%
5	Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum	proporsi ketersediaan Air baku	3,86%	2,92 %	10.600 Jiwa ----- x 100 362.998 Jiwa	76%
		Proporsi jumlah masyarakat yang mengakses air minum	18,07%	16,71 %	58.703 Jiwa ----- x 100 362.998 Jiwa	89,49%
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Pemukiman	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	3.87%	3,86%	1.799 Jiwa ----- x 100 46.625 Jiwa	99.74%
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun	2503 Unit	1711 Unit	1.711 Unit ----- x 100 2.503 Unit	68,35%
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Misi Kedua : Mewujudkan Kota Jayapura yang Bersih, Indah, Lestari, Manusiawi, Aman dan Nyaman						99.59%
8	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan	Ratio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0,20%	0.18%	667,71 Km ----- x 100 362.998 Jiwa	90 %
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Misi Ketiga : Mewujudkan Kota Jayapura Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa						90%

9	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	68	54	$\frac{12 \text{ Jenis}}{22 \text{ Jenis}} \times 100$	79,41%
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Misi Keempat : Membangun Tata Pemerintahan Yang Baik (good governance)						79,41%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau melebihi 100% ditunjukkan pada indikator sebagai berikut : Prosentase RTH : 150%; Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik : 146%;

Capaian kinerja yang tidak sesuai target atau dibawah 100% dari target Indikator Kinerja Utama disebabkan karena besar Pagu anggarannya tidak sesuai dengan yang diprogramkan pada Renstra OPD hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Tahun 2023-2026 sebanyak 9 (sembilan) sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura, dari 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas (table 3.1) dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.2
**Capaian Indikator Kinerja
 Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
 dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura
 Tahun 2023**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Bangunan yang Nyaman untuk tempat Beribadah dalam kondisi baik (Unit)	Unit	4	3	75,00
2	Prosentase RTH	Persen	0,002	0,003	150,00
3	Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik	Hektar	1,21	1,77	146,28
4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	Persen	26,36	24,87	94,35
5	Proporsi pengurangan Wilayah Rawan Bencana	Persen	3,94	3,84	97,46
6	proporsi ketersediaan Air baku	Persen	3,86	2,92	75,65
7	Proporsi jumlah masyarakat yang mengakses air minum	Persen	18,07	16,71	92,47
8	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	3,87	3,86	99,74
9	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun	Persen	2503	1711	68,36
10	Ratio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Persen	0,20	0,18	90,00

11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	68	54	79,41
----	----------------------------	--------	----	----	-------

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Jayapura Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	2 Indikator
2	Sesuai Target	0 Indikator
3	Tidak Mencapai Target	9 Indikator

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 10 (sepuluh) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Mewujudkan Kota Jayapura yang Bersih, Indah, Lestari, Manusiawi, Aman dan Nyaman	Jumlah Bangunan yang Nyaman untuk tempat Beribadah dalam kondisi baik (Unit)					4	75

		Prosentase RTH	0,003	150				
		Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik	1,77	146				
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang					24,87	94,35
		Proporsi pengurangan Wilayah Rawan Bencana					3,84	97,43
		proporsi ketersediaan Air baku					2,92	76
		Proporsi jumlah masyarakat yang mengakses air minum					16,71	89,49
		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak					3,86	99,74
		Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun					1711	68,35
2	Mewujudkan Kota Jayapura Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa	Ratio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk					0,18	90
3	Membangun Tata Pemerintahan Yang Baik (good governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat					54	79,41

Dari 9 sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 2		
1	Melebihi/Melampaui Target	2	20%
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target	7	80%
B.	Misi 3		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target	1	100%
C.	Misi 4		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target	1	100%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator

sasaran dari 9 sasaran dan 11 indikator kinerja dari 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Tersediannya Sarana dan Prasarana Peribadatan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Tersediannya Sarana dan Prasarana Peribadatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Jumlah Bangunan yang Nyaman untuk tempat Beribadah dalam kondisi baik	Unit	4	3	75	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja					75		

Sasaran Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama dapat dilihat dari 1 (satu) indicator : Jumlah Bangunan yang Nyaman untuk tempat Beribadah dalam kondisi baik

Capaian kinerja nyata indikator Jumlah Bangunan yang Nyaman untuk tempat Beribadah dalam kondisi baik adalah sebesar 3 dari target sebesar 4 yang direncanakan dalam RENSTRA Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 75 % atau tidak mencapai target yang direncanakan. Capaian ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 8%

Kegagalan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Toleransi Antar Umat

Beragama disebabkan faktor penghambat sebagai berikut :

Faktor Penghambat

1. Alokasi Pagu Anggaran terhadap program ini tidak sesuai dengan Renstra
2. Pengurangan Anggaran terhadap kegiatan yang sudah diprogramkan akibat dana yang terbatas

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran
Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)	
1	Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama	Jumlah Bangunan yang Nyaman untuk tempat Beribadah dalam kondisi baik	Unit	4	3	75	Program Penataan Bangunan Gedung	13.032.545.000	12.742.456.973	97,44	
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					75	TOTAL PER SASARAN	13.032.545.000	12.742.456.973	97,77
TINGKAT EFISIENSI						-22,77	%				
TINGKAT EFEKTIFITAS						76,71	%				

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Mengusulkan atau merencanakan kembali ditahun berikutnya agar target

sasaran dapat tercapai 100%

2. Tetap konsisten mengikuti rencana strategis yang sudah ditetapkan dalam penyusunan rencana kerja tiap tahun

Dokumentasi Kegiatan :



Pembangunan Pagar Gereja Elim



Pemasangan Paving Blok Gereja Henwani



Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GKI Kalfaria

Sasaran 2
Tersedianya Taman Kota yang nyaman dan aman

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Tersedianya Taman Kota yang nyaman dan aman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Prosentase RTH	%	0.002	0.003	150	0.005	60
2	Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik	Ha	1,21	1,77	146	1.61	109
Rata-rata Capaian Kinerja			148 %				

Sasaran :

Tersedianya Taman Kota yang nyaman dan aman,
dapat dilihat dari 2 (Dua) indicator, sebagai berikut :

1. Prosentase RTH.
2. Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik

Capaian kinerja nyata indicator 1. Prosentase RTH adalah sebesar 0.003% dari target sebesar 0.002% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 150 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini naik dari capaian tahun sebelumnya.

Capaian kinerja nyata indicator 2. Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik adalah sebesar 1,77 Ha dari target sebesar 1.21 Ha yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 146 %,

Tahun 2023 adalah tahun pertama Renstra, capaian tahun 2023 untuk indikator Prosentase RTH sebesar 0.003% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas sebesar 0.005% maka capaian kinerjanya mencapai 60%, sedangkan untuk indikator Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik sebesar 1.77 Ha bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas sebesar 1,61 Ha maka capaian kinerjanya mencapai 109%, Data penunjang capaian kinerja indikator Prosentase RTH dan Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik yang diperoleh dari Kabid / Kasi Pertamanan Sebagaimana table berikut:

Tabel 3.9
Data Penunjang Sasaran 2

NO	NAMA DATA	JENIS	SATUAN
1	Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 – 2033 (BAB IV)	Buku	Dokumen
2	DPPA Tahun 2023	Buku	Dokumen
3	Renstra Tahun 2023 - 2026	Buku	Dokumen

Capaian kinerja indikator Prosentase RTH sebesar 150% lebih tinggi dari capaian rata-rata kota Jayapura, dan bila dibandingkan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Capaian tersebut lebih tinggi.

Capaian kinerja sasaran Tersedianya Taman Kota yang nyaman dan aman

didukung oleh Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota . Output program dan kegiatan tersebut antara lain Taman yang dikelola dalam kondisi mantap dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik / Kurang
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati Lainnya	2.550.000.000	2.161.938.750	Taman yang dikelola dalam kondisi mantap	Baik

Kurang berhasilnya pencapaian kinerja sasaran disebabkan Faktor Non Teknis sebagai berikut :

Faktor Penghambat

1. Pembuatan Taman segitiga Vihara tidak dilaksanakan dikarenakan Permintaan Ganti Rugi Tanah oleh pemilik Hak Ulayat Terlalu Besar,

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Capaian kinerja indicator Prosentase RTH dan Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2
Tersedianya Taman Kota yang nyaman dan aman

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Tersedianya Taman Kota yang nyaman dan aman	Prosentase RTH	Persen	0,002	0,003	150,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.550.000.000	2.161.938.750	84,78
		Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik	Ha	1,21	1,77	146,00				
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR								
						TINGKAT EFISIENSI	63,22	%		
						TINGKAT EFEKTIFITAS	174,57	%		

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Tersedianya Taman Kota yang nyaman dan aman

, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Program yang sudah direncanakan wajib dilaksanakan secara konsisten tiap tahunnya
2. Beban anggaran disesuaikan dengan beban kerja

Dokumentasi Kegiatan :

	
Pengadaan Polybag	Penyiraman
	
Pemeliharaan Tugu Ardipura	Pengadaan Pupuk Non Subsidi

	
Pemangkasan Pohon	Pembuatan Lubang dan penanaman Pohon tinggi 3 M
	
Pemeliharaan Taman Median Jalan	Penanaman Bunga

**Sasaran 3
Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW**

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.12
Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	26,36	24,87	94,35	32,8	75,82
Rata-rata Capaian Kinerja			85,09 %				

Sasaran :

Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW

dapat dilihat dari 1 (satu) indikator, sebagai berikut :

1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja tiap indikator sasaran
berdasarkan sasaran ke 3

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	PROSENTASE	CAPAIAN KINERJA NAIK/TURUN
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	44,10%	24,87%	56,39%	Turun

Tahun 2023 adalah tahun Pertama Renstra, capaian tahun 2023 sebesar 24,87% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas maka capaian kinerjanya mencapai 75,82 %.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah didukung oleh beberapa Program dan kegiatan, gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output
serta dampak terhadap capaian kinerja.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/ Kurang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	622.000.000	618.034.798	Tersedianya Dokumen RDTR	Baik

Kurang Berhasilnya pencapaian kinerja sasaran Capaian kinerja pada indikator untuk sasaran Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW disebabkan faktor Penghambat sebagai berikut :

Faktor Penghambat

1. Anggaran yang dibutuhkan untuk menyusun RDTR tidak sesuai dengan yang tersedia

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Capaian kinerja Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.15
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	26,36	24,87	94,35	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	622.000.000	618.034.798	99,36
							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	200.000.000	200.000.000	100
							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	400.000.000	398.763.659	99,69
							RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR			94,347
TINGKAT EFISIENSI						-5,23	%			
TINGKAT EFEKTIFITAS						94,75	%			

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Program yang sudah direncanakan wajib dilaksanakan secara konsisten tiap tahunnya
2. Beban anggaran disesuaikan dengan beban kerja

Data Pendukung Dari Seksi Pelaksana Kegiatan, berupa Dokumentasi Kegiatan Terkait Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW

Dokumentasi Kegiatan :

1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

	
<p>Pengajuan Advice Planning</p>	<p>Survey / Pengawasan Pengendalian Tata Ruang</p>



Rapat TKPRD

Pengukuran Advice Planning

**Sasaran 4
Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi**

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.16
Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Proporsi pengurangan Wilayah Rawan Bencana	Persen	3,94	3,84	97,46	4,17	92,09
Rata-rata Capaian Kinerja			97,46 %				

Sasaran :

Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi

dapat dilihat dari 1 (satu) indicator, sebagai berikut :

1. Proporsi pengurangan Wilayah Rawan Bencana (%)

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja tiap indikator sasaran
berdasarkan sasaran ke 4

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	PROSENTASE	CAPAIAN KINERJA NAIK/TURUN
1	Proporsi pengurangan Wilayah Rawan Bencana	23,14	3,84	16,59	Turun

Tahun 2023 adalah tahun Pertama Renstra 2023 - 2026 yang mengacu pada visi dan misi RPJPD sehingga ada perbedaan terkait perhitungan capaian, Hasil capaian Sasaran ke 4 tahun 2023 sebesar 3,84% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra periode 2023-2026 Dinas maka capaian kinerjanya mencapai 92,09% dengan kata lain hasil ini baik.

Capaian kinerja sasaran Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi didukung oleh Program dan kegiatan, gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja Sasaran 4.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuat Tebing	4.138.000.000	4.129.121.300	Panjang Talud yang dibangun : 848 M	Baik
			Normalisasi/ Restorasi Sungai	1.500.000.000	1.500.000.000	Kali Terpelihara, Terkeruknya Sedimen : 4.544,89 M3	Baik
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.600.000.000	2.598.165.700	Panjang Drainase Terbangun : 833,51 M	Baik
			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1.250.000.000	1.249.242.000	Panjang Drainase yang ditingkatkan : 453,43 M	Baik
			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.150.000.000	1.149.085.000	Panjang Drainase yang di rehab : 561 M	Baik

Kurang tercapainya kinerja sasaran Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi jika dibandingkan target Renstra disebabkan faktor penghambat sebagai berikut :

Faktor Penghambat

1. Kurangnya Alokasi Anggaran untuk pemenuhan target Renstra
2. keterbatasan anggaran sehingga program yang telah ditetapkan pada Renstra tidak dapat terealisasi

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Capaian kinerja pada beberapa indikator untuk sasaran Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi disebabkan faktor penunjangnya sebagai berikut :

Faktor Penunjang

1. Program kerja yang ditetapkan di tahun 2023 dalam DPPA dapat terselesaikan 100%

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Capaian kinerja Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran
Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi	Proporsi pengurangan Wilayah Rawan Bencana	Persen	3,94	3,84	97,46	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.138.000.000	4.129.121.300	99,79
							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.600.000.000	2.598.165.700	99,93
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.250.000.000	1.249.242.000	99,94
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.150.000.000	1.149.085.000	99,92
							RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR			97,46
TINGKAT EFISIENSI						-2,42	%			
TINGKAT EFEKTIFITAS						97,57	%			

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Program yang sudah direncanakan wajib dilaksanakan secara konsisten tiap tahunnya
2. Data terkait potensi rawan benaca longsor, banjir dan abarasi harus di update tiap tahunnya agar dapat dimitigasi dengan baik
3. Perlu kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan Sungai/Kali dan Drainase agar potensi banjir dapat dikurangi

Data Pendukung Dari Seksi Pelaksana Kegiatan, berupa Dokumentasi Kegiatan Terkait Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi

1. Panjang Talud Terbangun

		
<p>Pembangunan Talud Angkasapura</p>	<p>Pembangunan Talud Poltekes Padang Bulan</p>	<p>Pembangunan Talud SIMBORGHONYI</p>

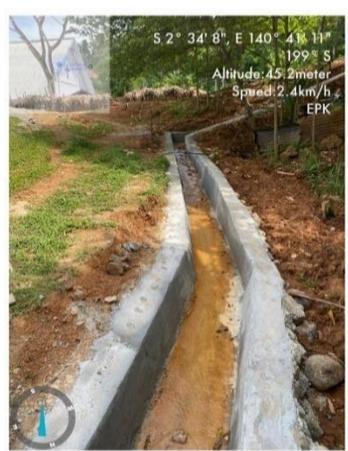
<p>Pembangunan Talud Buper Waena</p>	<p>Pembangunan Talud Jl.Sabang Merauke</p>	<p>Pembangunan Talud Angkasa II</p>

1. Jumlah Sedimen Kali / Sungai yang dikeruk

<p>Nomalisasi Sungai Anafre</p>	<p>Normalisasi Gorong-gorong siborgonyi</p>	<p>Normalisasi Samping SD PGRI Tanah Hitam</p>

 <p>Jalan Baru Pasar Lama, 9MPF+2VG, Awiyo, Abepura, Awiyo, Kec. Abepura, Kota Jaya... Monday, 16-10-2023 01:15:07 PM</p>	 <p>Jl. Beringin No.4, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua 99221, Ind... Monday, 11-09-2023 09:40:18 AM</p>	 <p>FP44+WFX, Numbai, Jayapura Selatan, Jayapura City, Papua, Indonesia Wednesday, 09-08-2023 07:38:17 AM</p>
<p>Normalisasi Jalan Baru Pasar Lama, Samping Pompa Bensin, Awiyo</p>	<p>Normalisasi samping SMU 4, Entrop</p>	<p>Normalisasi Numbay, Jayapura Selatan</p>

2. Panjang Drainase Terbangun, Ditingkatkan dan di Rehabilitasi

 <p>Shot on vivo 21 2023.09.26 14:02</p>	 <p>Shot on vivo 21 2023.09.26 14:02</p>	 <p>S 2° 34' 8", E 140° 41' 11" Altitude: 45.2meter Speed: 2.4km/h EPK</p>
<p>Pembangunan Drainase RT.01,02,03 /RW.12,13 Kelurahan Entrop</p>	<p>Rehabilitasi Drainase RT.07/ RW.09 Kelurahan Imbi</p>	<p>Pembangunan Drainase RT.04/RW.10 Kelurahan Entrop</p>

		
<p>Pembangunan Drainase Jalan Sampan Dok VIII Kelurahan Imbi</p>	<p>Pembangunan Drainase RT.03 RW.07 di Kelurahan Tanjung Ria</p>	<p>Pembangunan Saluran Drainase RT.001 RW.004 Nirwana, Kel. Angkasa</p>

Sasaran 5
Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.20
Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	proporsi ketersediaan Air baku	Persen	3,86	2,92	75,65	5,51	52,99
	Proporsi jumlah masyarakat yang mengakses air minum	Persen	18,07	16,71	92,47	36,53	45,74
Rata-rata Capaian Kinerja					84,06	%	49,37

Sasaran :

Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum

dapat dilihat dari 2 (dua) indicator, sebagai berikut :

1. Prosentase Jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi

Tabel 3.21
Perbandingan Capaian Kinerja tiap indikator sasaran
berdasarkan sasaran ke 5

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	PROSENTASE	CAPAIAN KINERJA
					NAIK/TURUN
1	proporsi ketersediaan Air baku	2,86	2,92	102,20	Naik
2	Proporsi jumlah masyarakat yang mengakses air minum	79,12	16,71	21,12	Turun

Tahun 2023 adalah tahun pertama evaluasi Renstra dengan rumusan perhitungan untuk capaian sasaran dan indikator yang berbeda dengan rumus perhitungan RENSTRA, Rata - rata Capaian Sasaran ke 5 tahun 2023 sebesar 84,06% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas maka capaian Rata-rata kinerjanya mencapai 49,37 %.

Capaian kinerja sasaran Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum didukung oleh beberapa Program dan kegiatan, gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja Sasaran 5

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/ Kurang
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	593.277.000	591.056.400	Jumlah jiwa yang terlayani : 890 Jiwa	Baik
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.391.000.000	2.385.083.000	Jumlah jiwa yang terlayani : 830 Jiwa	Baik

Pencapaian kinerja sasaran Capaian kinerja pada beberapa indikator untuk sasaran Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum disebabkan faktor penunjang dan Penghambat sebagai berikut :

Faktor Penunjang :

1. Dapat menyelesaikan Program dan Kegiatan 100%
2. Tidak adanya hambatan dalam pekerjaan Fisik

Sedangkan faktor yang menghambat adalah

Faktor Penghambat :

1. Anggaran yang direncanakan dalam Renstra 2023-2026 tidak terealisasi 100% artinya terdapat kekurangan anggaran dari yang direncanakan sehingga capaian kinerja tidak terlaksana semuanya
2. Tahun 2023 merupakan tahun pertama diberlakukannya Renstra 2023 - 2026 yang menjadi acuan penilaian capaian kinerja

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Capaian kinerja Meningkatnya Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.23
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran
Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum	proporsi ketersediaan Air baku	Persen	3,86	2,92	75,65	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	593.277.000	591.056.400	99,63
		Proporsi jumlah masyarakat yang mengakses air minum	Persen	18,07	16,71	92,47	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.391.000.000	2.385.083.000	99,75
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					84,06	TOTAL PER SASARAN	2.984.277.000	2.976.139.400
TINGKAT EFISIENSI						15,67	%			
TINGKAT EFEKTIFITAS						84,29	%			

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

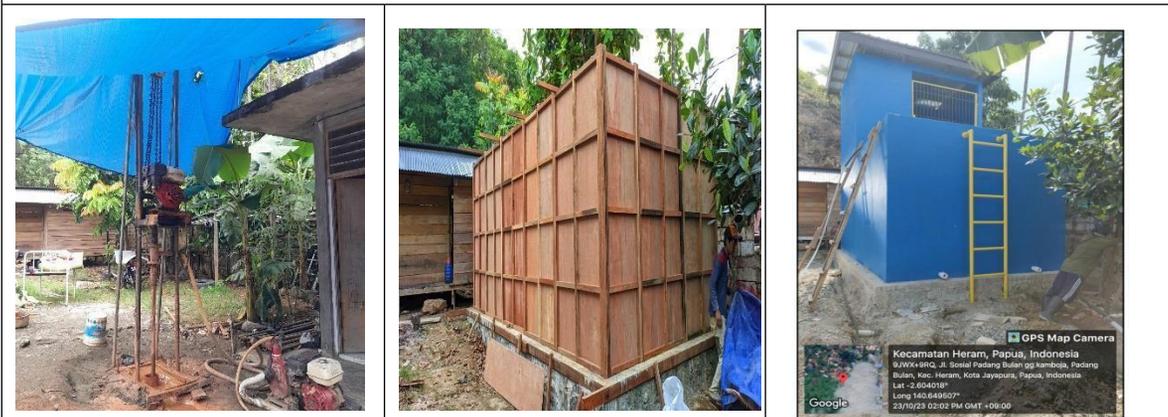
1. Program yang sudah direncanakan wajib dilaksanakan secara konsisten tiap tahunnya
2. Penganggaran Kegiatan harus sesuai perencanaan (Target Renstra 2023-2026)
3. Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal pembiayaan kegiatan harus konsisten dengan perencanaan yang sudah disusun agar kinerja dapat tercapai dan masyarakat juga bisa merasakan adanya pembangunan.
4. Program-Program Pemerintah Lintas OPD harus disinkronisasikan sesuai tupoksi OPD yang diterngakan lewat Target Sasaran Program yang jelas

Data Pendukung Dari Seksi Pelaksana Kegiatan, berupa Dokumentasi Kegiatan
Terkait :

Meningkatnya Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum



PEMBANGUNAN SUMUR, PENGELOLAAN AIR BAKU DAN JARINGAN DISTRIBUSI PERPIPAAN SR DI BHAYANGKARA BELAKANG RSUD DOK II JAYAPURA



PEMBANGUNAN SUMUR, PENGELOLAAN AIR BAKU DAN JARINGAN DISTRIBUSI PERPIPAAN DI KELURAHAN HEDAM (50 KK/SR)



PEMBANGUNAN SUMUR, PENGELOLAAN AIR BAKU DAN JARINGAN DISTRIBUSI SR DI KAMPUNG TAHIMA SOROMA (50 KK/SR)



PEMBANGUNAN SUMUR PENGELOLAAN AIR BAKU DAN JARINGAN DISTRIBUSI SR RT.03/RW.05 KELURAHAN TANJUNG RIA

Sasaran 6
Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Pemukiman

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.24
Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Pemukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	3,87	3,86	99,74	6,98	55,30

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Pemukiman

dapat dilihat dari (1) indikator, sebagai berikut :

1. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak

Tabel 3.25
Perbandingan Capaian Kinerja tiap indikator sasaran
berdasarkan sasaran ke 6

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	PROSENTASE	CAPAIAN KINERJA NAIK/TURUN
1	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	9,18	3,86	42,05	Turun

Tahun 2023 adalah tahun pertama Renstra 2023 - 2026 maka apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu terdapat penurunan capaian sebesar 5,32%, untuk Capaian Sasaran ke 6 tahun 2023 sebesar = 3.86% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas maka capaian kinerjanya baru mencapai 55.30%.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Pemukiman didukung oleh beberapa Program dan kegiatan, gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output
serta dampak terhadap capaian kinerja Sasaran 6.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/ Kurang
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/P enyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.000.000.000	1.000.000.000	100	Baik
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	250.000.000	250.000.000	100	Baik

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan beberapa indikator untuk sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman disebabkan faktor Penunjang sebagai berikut :

Faktor Penunjang

1. Pekerjaan Fisik tercapai 100%
2. Waktu pengerjaan kegiatan yang cukup

Kegagalan pencapaian kinerja sasaran antara Renstra 2018-2022 dengan Renstra 2023 – 2026 sebagai berikut :

Faktor Penghambat

1. anggaran perlu disesuaikan dengan rencana Renstra

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Pemukiman, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.27
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Pemukiman

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Air Limbah	Prosentase Jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi	Persen	3,87	3,86	99,74	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Limbah	1.000.000.000	1.000.000.000	100
								250.000.000	250.000.000	100
							RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR			99,74
TINGKAT EFISIENSI						-0,26	%			
TINGKAT EFEKTIFITAS						99,74	%			

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Pemukiman, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Program yang sudah direncanakan pada Dokumen Perencanaan Renstra wajib dilaksanakan secara konsisten tiap tahunnya
2. Penganggaran Kegiatan harus sesuai perencanaan (Target Renstra)
3. Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal pembiayaan kegiatan harus konsisten dengan perencanaan yang sudah disusun agar kinerja dapat tercapai dan masyarakat juga bisa merasakan adanya pembangunan.
4. Program-Program Pemerintah Lintas OPD harus disinkronisasikan sesuai tupoksi OPD yang ditargetkan lewat Target Sasaran Program yang jelas

Data Pendukung Dari Seksi Pelaksana Kegiatan, berupa Dokumentasi Kegiatan Terkait :

Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Air Limbah



PEMBANGUNAN IPAL KOMUNAL
SKALA PEMUKIMAN KAYU PULO
(25 KK)

Sasaran 7
Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

Pencapaian sasaran 7 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.28
Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun	Unit	2503	1711	68,36	3798	45,05
Rata-rata Capaian Kinerja					68,36	%	

Sasaran :

Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman, dapat dilihat dari 1 (satu) indikator, sebagai berikut :

1. Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun

Tabel 3.29
Perbandingan Capaian Kinerja tiap indikator sasaran berdasarkan sasaran ke 7

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	PROSENTASE	CAPAIAN KINERJA NAIK/TURUN
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun	946,00	1711,00	180,87	Naik

Tahun 2023 adalah tahun pertama Renstra 2023 - 2026 maka untuk Capaian Sasaran ke 7 tahun 2023 sebesar = 1.711 Unit bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas sebesar 3.798 maka capaian kerjanya baru mencapai 45,05%.

Capaian kinerja sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman didukung oleh beberapa Program dan kegiatan, gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	10.470.842.500	9.906.647.000	Jumlah Rumah Terbangun : 32 Unit	Kurang
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.652.111.900	2.652.051.900	Jumlah Rumah yang di Rehab : 105 Unit	Baik
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA , SARANA UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.821.030.000	6.784.707.850	Jumlah PSU yang terpasang : 1.574 titik	Baik

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan indikator untuk sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman disebabkan faktor Penunjang sebagai berikut :

Faktor Penunjang

1. Anggaran Sesuai dengan kebutuhan
2. Waktu pengerjaan kegiatan yang cukup

Kegagalan pencapaian kinerja sasaran dan beberapa indikator untuk sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman disebabkan faktor Penghambat sebagai berikut :

Faktor Penghambat

1. Adanya Pekerjaan yang tidak selesai 100%

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Capaian kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.31
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun	Unit	2.503	1.711	68,36	Program Kawasan Permukiman	10.470.842.500	9.906.647.000	94,61
								2.652.111.900	2.652.051.900	100,00
							Program Peningkatan Prasarana , Sarana Utilitas Umum (PSU)	6.821.030.000	6.784.707.800	99,47
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR			68,36	TOTAL PER SASARAN	19.943.984.400	19.343.406.700	96,99	
TINGKAT EFISIENSI						-	28,63	%		
TINGKAT EFEKTIFITAS						70,48	%			

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Program yang sudah direncanakan wajib dilaksanakan secara konsisten tiap tahunnya
2. Dalam penegakan Perda terkait tata ruang perlu sinergitas antara OPD terkait, dan masyarakat agar dalam melakukan penataan ruang tidak ada

kendala yang berarti

3. IMB yang dikeluarkan harus mencerminkan keadaan dilapangan
4. Perlu dillakukan penyesuaian Perda terkait RTRW

Data Pendukung Dari Seksi Pelaksana Kegiatan, berupa Dokumentasi Kegiatan Terkait **Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman**

1. Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun

		
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI KELURAHAN ENTROP		
		
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI KELURAHAN ASANO		



PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI KELURAHAN BHAYANGKARA



PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI KELURAHAN HAMADI



Pembuatan Lampu Hias Tulisan "WELCOME TO KOTA JAYAPURA"

A. Dokumentasi Pemasangan LPJU baru



Sasaran 8

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan

Pencapaian sasaran 8 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.32

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Ratio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Persen	0,20	0,18	90,00	0,28	64,29
Rata-rata Capaian Kinerja					90,00	%	

Sasaran :

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, dapat dilihat dari 1 (satu) indicator, sebagai berikut :

1. Ratio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Tabel 3.33
Perbandingan Capaian Kinerja tiap indikator sasaran
berdasarkan sasaran ke 8

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	PROSENTASE	CAPAIAN KINERJA NAIK/TURUN
1	Ratio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0,18	0,20	111,11	Naik

Tahun 2023 adalah tahun pertama Renstra 2023-2026, capaian Sasaran ke 8 tahun 2023 untuk sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan tercapai sebesar 0.18% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2023-2026 Dinas sebesar 0.28% maka capaian kinerjanya mencapai 64.29 % capaian ini baik.

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan didukung oleh Program dan kegiatan, gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.34

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja Sasaran 8

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/ Kurang
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Pembangunan Jalan	1.674.876.892	1.667.328.000	Panjang Jalan yang terbangun : 522M ¹	Baik
			Rehabilitasi Jalan	18.245.000.000	18.022.101.820	Panjang Jalan yang direhab : 6163,88M ¹	Baik
			Pemeliharaan Berkala Jalan	2.411.082.006	2.406.183.000	Panjang Jalan yang dipelihara berkala : 793,60 M ¹	Baik
			Pemeliharaan Rutin Jalan	734.038.480	733.747.700	Panjang Jalan yang dipelihara rutin : 829,22M ¹	Baik

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan beberapa indikator untuk sasaran Menigkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan disebabkan faktor Penunjang sebagai berikut :

Faktor Penunjang

1. Tidak di Refocusing Anggaran Kegiatan
2. Waktu pengerjaan kegiatan yang cukup

Tabel 3.35
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan	Ratio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Persen	0,18	0,20	111,111	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.674.876.892	1.667.328.000	99,55
								18.245.000.000	18.022.101.820	98,78
								2.411.082.006	2.406.183.000	99,80
								734.038.480	733.747.700	99,96
								TOTAL PER SASARAN	23.064.997.378	22.829.360.520
TINGKAT EFISIENSI						12,13	%			
TINGKAT EFEKTIFITAS						112,25	%			

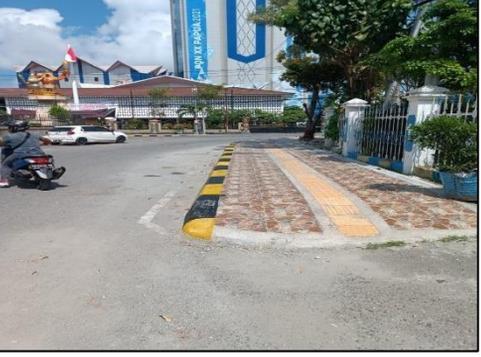
Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Usulan dari Musrembang untuk infratruktur jalan harus sudah matang lahannya agar proses pelaksanaannya berjalan lancar
2. Anggaran Infrastruktur Jalan harus ditambah khusus untuk distrik Muara Tami Data Pendukung dari Seksi Pelaksana Kegiatan, berupa Dokumentasi Kegiatan Terkait Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan

1. Dokumentasi Kegiatan Infrastruktur Jalan

	
<p>Rehabilitasi Jalan Bhayangkara 3, Kelurahan Bhayangkara (DBH)</p>	<p>Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT.02/RW.01, Kelurahan Wahno Otonom Kotaraja (DBH)</p>

<p>Pembangunan Jalan Pasir II RT.01/RW.01 Kelurahan Tanjung Ria (SILPA OTSUS)</p>	<p>Pembangunan Jalan Menuju TPU Buper Waena</p>
<p>Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Koya Barat Koya Timur</p>	<p>Pemeliharaan Rutin Jalan</p>
<p>Rehabilitasi Jalan Jln. Woroth Perum Uncen Abepura</p>	<p>Rehabilitasi Jalan Kampung Ambon RT.02/RW.07 Kelurahan Abepantai Distrik Abepura</p>

	
<p>Rehabilitasi Jalan Permukiman Desa Swarkasa - Jl. Gurami Koya Timur (SILPA BEBAS)</p>	<p>Pembangunan Jalan Penghubung Koya Barat - Koya Timur (OTSUS - BG)</p>
	
<p>Rehabilitasi Jalan Hamadi Beach RT.03/RW.VIII</p>	<p>Rehabilitasi Jalan Halilantar Koya Timur</p>
	
<p>Rehabilitasi Trotoar Kota Taman Imbi, Depan Klasis, Jalan Irian - Peln Lama</p>	<p>Rehabilitasi Jalan RT.01/RW.03 Kelurahan Wai Mhorock</p>

	
Rehabilitasi Jalan Aspol Rebes SPN Base G	Rehabilitasi Jalan Rumah Murah RT.01/RW.02 Kelurahan Vim

Sasaran 9
Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik

Pencapaian sasaran 9 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.36
Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	68	54	79,41	74	72,97
Rata-rata Capaian Kinerja					79,41	%	

Sasaran :

Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik, dapat dilihat dari 1 (satu) indicator, sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD)

Sasaran :

- (1) Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik

dapat dilihat dari 1 (satu) indicator, sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian kinerja nyata indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar 54 dari target sebesar 68 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 79,41 % atau kurang target yang diperjanjikan. Capaian ini turun dari capaian tahun sebelumnya.

Tahun 2023 adalah tahun Pertama Renstra 2023-2026, capaian tahun 2023 sebesar 54 bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kerjanya mencapai 72,97%. Data penunjang capaian kinerja indicator Indeks Kepuasan Masyarakat, diperoleh dari kasubag Keuangan Sebagaimana table berikut :

Tabel 3.37
Data Penunjang Sasaran 9

NO	NAMA DATA	JENIS	SATUAN
1	Realisasi Fisik dan keuangan (RFK) Tahun 2023	Table	Dokumen
2	DPPA Tahun 2023	Buku	Dokumen
3	RENSTRA 2023-2026	Buku	Dokumen
4	RENJA 2023	Buku	Dokumen

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Administrasi Umum . Output program dan kegiatan tersebut antara lain terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan publik dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.38

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik / Kurang
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	48.000.000	47.784.604	Tersedianya Listrik, Air dan Komunikasi	Baik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.436.330.000	2.433.730.000	Tersedianya gaji Honorer	Baik
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.610.767.000	9.873.453.363	Tersedianya gaji ASN	Baik
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269.556.000	269.551.000	ATK untuk aktifitas pelayanan	Baik
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	104.995.200	104.995.200	Tersedianya Fasilitas Penggandaan	Baik
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.790.000	9.790.000	Tersedianya Prasarana penerangan	Baik
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	Tersedianya bacaan penunjang kinerja	Baik
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	409.120.000	409.120.00	Tersedianya Sarana Penunjang kegiatan	Baik
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	552.787.400	552.548.529	Lancarnya koordinasi	Baik

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	11.080.000	11.080.000,00	Tersediannya gedung kantor yang baik	Baik
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	300.126.400	300.126.400	Tertip Pajak Kendaraan	Baik
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	25.000.000	Tersediannya Prsaran alat berat yang baik	Baik
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtsar Realisasi Kinerja SKPD	42.215.000	42.215.000	Tersusunnya Laporan Tahunan dan Keuangan	Baik

Kurang berhasilnya pencapaian kinerja sasaran Capaian kinerja indicator Indeks Kepuasan Masyarakat disebabkan faktor Anggaran sebagai berikut :

Faktor Penghambat

1. Anggaran yang terbatas
2. Pengurangan Alokasi Anggaran kepada Dinas PUPRPKP membuat kegiatan yang sudah diprogramkan tidak dapat di programkan

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Capaian kinerja indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) , dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.39
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 9
Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.39
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi
perkantoran pemerintahan yang baik

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	10	11	110	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	48.000.000	47.784.604	99,55
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.436.330.000	2.433.730.000	99,89
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.610.767.000	9.873.453.363	93,05
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269.556.000	269.551.000	100,00
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.995.200	104.995.200	100,00
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.790.000	9.790.000	100,00
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100,00
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	409.120.000	409.120.000	100,00
							Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	552.787.400	552.548.529	99,96
							Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	11.080.000	11.080.000,00	100,00
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	300.126.400	300.126.400	100,00
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	25.000.000	100,00
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtsar Realisasi Kinerja SKPD	42.215.000	42.215.000	100,00
TOTAL PER SASARAN						14.822.767.000	13.673.274.096	92,25		
TINGKAT <u>EFISIENSI</u>						17	%			
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u>						119	%			

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Anggaran yang diberikan sesuai dengan Renstra

4. Pengawasan atau Pemantauan Aktivitas Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan kegiatan di bidang pembangunan Infrastruktur sehingga aktifitas lapangan sangat tinggi.

Untuk melakukan pengawasan atau Pemantauan terhadap seluruh kegiatan maka perlu dilakukan secara Monitoring langsung ke lokasi kegiatan agar semua kegiatan fisik dapat terpantau dan berjalan sesuai jadwal perencanaan kerja.

Adapun pengawasan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara langsung ke lapangan maupun dengan mengadakan rapat internal di kantor, agar permasalahan yang timbul baik secara teknis maupun non teknis dapat teratasi.

Dalam melakukan Pengawasan kegiatan Dinas PUPRKP Kota Jayapura melibatkan Instansi terkait yang ikut melakukan Monitoring Lapangan terkait Progres kerja dan hasil Pelaksanaan kegiatan, Bappeda dalam hal ini merupakan Instansi terkait yang biasanya bersama – sama dengan Tim melakukan Pengawasan / Monitoring

Data Pendukung Terkait Pengawasan dan Pemantauan



Pengawasan Langsung ke Lapangan



Monitoring Lapangan bentuk pengawasan dari Instansi Terkait



Pemantauan Lapangan

Rapat Internal pembahasan permasalahan dilapangan

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya Belanja Langsung untuk semua program adalah Rp. 81.757.546.412,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 87.060.595.078,00. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 93,91 % atau sebesar Rp. 5.303.048.666,00 Persentase efisiensi ini secara teori cukup baik sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multi pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu Peningkatan Kualitas SDM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman terus dilakukan dengan memberikan izin bagi pegawai yang ingin mengembangkan atau meningkatkan kapasitas sumber daya dirinya dengan mengikuti Bimtek dan pelatihan.

Dalam tahun ini sudah ada 3 tambahan pegawai yang lulus sertifikasi Barang dan jasa, serta para pegawai yang ikut dalam Bimtek yang diselenggarakan oleh Dinas terkait misalnya : Bimtek penyusunan SAKIP yang diselenggarakan oleh Bagian

Organisasi Tata Laksana Setda Kota Jayapura dan Bimtek Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sehingga kualitas SDM Dinas PUPRKP Kota Jayapura terus meningkat sesuai kebutuhan Organisasi.

Data Pendukung Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

		
Bimtek Barang/Jasa	Bimtek SAKIP	Bimtek RKBMD

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura mengelola Dana APBD sebesar

Rp. 97.671.362.078,00 terdiri dari Belanja tidak langsung yang merupakan belanja pegawai sebesar Rp. 10.610.767.000,00 dan Belanja langsung untuk pembiayaan program dan kegiatan sebesar Rp. 87.060.595.078,00, Anggaran tersebut bersumber dari :

1. Dana DAU Rp. 51.339.084.006
2. Dana Silpa DAK Perumahan Rp. 2.645.842.500
3. Dana Silpa DAK Jalan Rp. 38.480
4. Dana OTSUS Rp. 636.803.072
5. Dana OTSUS BLOCK GRAND Rp. 12.015.185.720
6. Dana OTSUS DTI Rp. 20.530.340.000
7. Dana DBH Pusat Rp. 10.504.068.300

Dari Anggaran belanja tidak langsung dana yang terealisasi sebesar Rp. 9.873.453.363,00 dan Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 81.757.546.412,00 yang digunakan untuk pembiayaan 12 (dua belas) program yang terinci dalam 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub kegiatan 188 (seratus delapan puluh delapan) Paket Pekerjaan. Di Tahun 2023 Daya serap Anggaran adalah 93,82% sedang untuk realisasi Fisik Sebesar 99,67 %

Di tahun 2023 Alokasi dana DPPA terdapat sisa dana sebesar Rp. 6.040.362.303,00 yang terdiri dari SILPA sebesar Rp. 6.040.362.303,00 dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jayapura

DPPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 97.671.362.078,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 91.630.999.775,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,82 %, sedangkan untuk realisasi fisik

sebesar 99,67 % dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 belum dapat menyelesaikan target dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran

Hal ini disebabkan ada 6 (enam) pekerjaan fisik yang tidak selesai ditahun 2023, yaitu :

1. Pekerjaan : Perbaikan Gor Waringin Kotaraja Tahap I (Multiyear)
Permasalahan : Pembuatan Bahan Baku Konstruksi di Fabrikasi diluar Papua (Space Frame) dan membutuhkan waktu yang lama
Solusi : kerana pekerjaan ini kontrak Multiyears jadi tetap berjalan sesuai Kontrak
2. Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Jerambah dan Dermaga di kampung enggros (Swakelola)
Permasalahan : kurangnya waktu dalam pengerjaanya mengingat pengerjaan ini harus membongkar Total Jalan Jerambah yang lama dan Pengerjaan diatas Air
Solusi : akan dilanjutkan kembali dengan memprogramkan Ulang di Tahun 2024
3. Paket Pekerjaan : Pembangunan Rumah Layak Huni Kelurahan Ardipura
Permasalahan : Penyedia tidak dapat menyelesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan
Solusi : akan dilanjutkan kembali dengan memprogramkan Ulang di Tahun 2024
4. Paket Pekerjaan : Pembangunan Rumah Layak Huni Kelurahan Koya Timur
Permasalahan : Kerana tanah yang akan dibangun Rumah bermasalah sehingga tidak dapat dilanjutkan mengingat waktu kerja yang singkat

Solusi : akan dipindah lokasi dan dilanjutkan kembali dengan memprogramkan Ulang di Tahun 2024

5. Paket Pekerjaan : Penataan Tugu Harmoni

Permasalahan : kurangnya waktu Pengerjaan

Solusi : dilanjutkan kembali dengan memprogramkan Ulang di Tahun 2024

6. Paket Pekerjaan : Pembuatan Taman Segitiga Vihara

Permasalahan : Permintaan Ganti Rugi Tanah oleh pemilik Hak Ulayat Terlalu Besar sudah dinegosiasi tetapi tidak tercapai kesepakatan harga

Solusi : pekerjaan di pending sampai ketemu harga yang sesuai

Terdapat sisa anggaran Silpa sebesar Rp. 6.040.362.303,00 hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien, adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40
Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun 2023

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Mewujudkan Kota Jayapura yang Bersih, Indah, Lestari, Manusiawi, Aman dan Nyaman	38.588.261.400	37.573.897.307	97,37

2	Mewujudkan Kota Jayapura Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa	23.064.997.378	22.829.360.520	92,76
3	Membangun Tata Pemerintahan Yang Baik (good governance)	14.822.767.000	14.082.394.096	95,01
Jumlah		76.476.025.778	74.485.651.923	91,44,00

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura pada tahun 2023.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.41
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Tahun 2023

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1,				
1	Melebihi/Melampaui Target	2	148%	2.161.938.750	84,78
2	Sesuai Target				
3	Tidak Mencapai Target	7	86,15%	35.411.958.557	98,26
B.	Misi 2,				

1	Melebihi/Melampaui Target				
2	Sesuai Target				
3	Tidak Mencapai Target	1	90%	22.829.360.520	89,89
C.	Misi 3,				
1	Melebihi/Melampaui Target				
2	Sesuai Target				
3	Tidak Mencapai Target	1	79.41%	14.082.394.096	95,01

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura menetapkan sebanyak 9 (sembilan) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja
Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2023

No.	Misi	Sasaran	Jumlah Indikator	Tingkat Pencapaian							
			Sasaran	SANGAT BAIK		BAIK		KURANG BAIK			
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Mewujudkan Kota Jayapura yang Bersih, Indah, Lestari, Manusiawi, Aman dan Nyaman	Tersediannya Sarana dan Prasarana Peribadatan	Jumlah Bangunan yang Nyaman untuk tempat Beribadah dalam kondisi baik (Unit)						4	75	
		Tersediannya Taman Kota yang nyaman dan aman	Prosentase RTH	0,003	150						
			Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik	1,77	146						
		Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)				24,87	94,35			
		Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi	Proporsi pengurangan Wilayah Rawan Bencana				3,84	97,43			
		Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum	proporsi ketersediaan Air baku							2,92	76
			Proporsi jumlah masyarakat yang mengakses air minum				16,71	89,49			

		Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Pemukiman	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak			3,86	99.74		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun					1711	68,35
2	Mewujudkan Kota Jayapura Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa	Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Jalan	Ratio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk			00.18	90		
3	Membangun Tata Pemerintahan Yang Baik (good governance)	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat					54	79,41

Tabel 4.2
Pencapaian Sasaran Dan Indikator Kinerja
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun
2023

No.	Misi	Sasaran	Jumlah Indikator	Tingkat Pencapaian						
			Sasaran	SANGAT BAIK		BAIK		KURANG BAIK		
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Mewujudkan Kota Jayapura yang Bersih, Indah, Lestari, Manusiawi, Aman dan Nyaman	Tersediannya Sarana dan Prasarana Peribadatan	Jumlah Bangunan yang Nyaman untuk tempat Beribadah dalam kondisi baik (Unit)						4	75
		Tersediannya Taman Kota yang nyaman dan aman	Prosentase RTH	0,003	150					
			Luas Ruang Kota yang Indah dan Nyaman dalam kondisi baik	1,77	146					
		Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)				24,87	94,35		
		Berkurangnya Luas Daerah Rawan Banjir, Rawan Longsor & Rawan Abrasi	Proporsi pengurangan Wilayah Rawan Bencana				3,84	97,43		
		Peningkatan ketersediaan Air Baku dan Air Minum	proporsi ketersediaan Air baku							2,92
Proporsi jumlah masyarakat yang mengakses air minum					16,71	89,49				

		Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Air Limbah Pemukiman	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak			3,86	99.74		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun					1711	68,35
2	Mewujudkan Kota Jayapura Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa	Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Jalan	Ratio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk			00.18	90		
3	Membangun Tata Pemerintahan Yang Baik (good governance)	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat					54	79,41

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 9 sasaran dan 11 Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) maka terdapat 2 indikator yang sangat baik, 5 Indikator yang Baik dan 4 indikator yang kurang tercapai, secara umum Sasaran Kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran Tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan melalui belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Jayapura Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 87.060.595.078,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 81.757.546.412,00 atau dengan serapan dana mencapai 93,82%,

Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura secara prosentase capain kinerja dibanding tahun 2022 naik sebesar 1,94% hal ini disebabkan tidak adanya pengurangan anggaran akibat pandemi covid 19 sehingga banyak program dan kegiatan yang diselesaikan sesuai target DPPA, sedangkan untuk sisa anggaran yaitu Silpa sebesar Silpa sebesar Rp. 6.040.362.303,00

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan Total anggaran DPPA sebesar Rp 97.671.362.078,00 (Belanja Tidak ILangsung dan Belanja Langsung) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura. Berdasarkan total Anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura adalah Rp. 91.630.999.775,00 atau 93,82% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Jayapura.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura kepada pihak-pihak

terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jayapura.

Jayapura, 20 Februari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAYAPURA**



NOFDI J. RAMPI, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650814 198703 1 018